



PENGADILAN
TINGGI AGAMA
PADANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN --- 2023

PENYUSUN

TIM PENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PTA PADANG

☎ 0751 - 7054806

✉ admin@pta-padang.go.id

🌐 www.pta-padang.go.id



@ptapadangoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id

Sekapur Sirih

KETUA PENGADILAN TINGGI
AGAMA PADANG



“Berikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan cara 5-S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun serta lakukan sesuatu yang hebat supaya hasilnya pun hebat”

(Abd. Hamid Pulungan)



Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum Wr Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bentuk informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan serta tugas penunjang yaitu administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan, pembinaan dan pengawasan. Laporan pelaksanaan kegiatan ini juga sebagai referensi dan evaluasi serta perencanaan di tahun mendatang agar kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat menjadi lebih baik untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya dalam bidang reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Padang terus berupaya untuk melanjutkan perjuangan dalam meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah pada tahun 2021 PTA Padang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengadilan Tinggi Agama Padang juga terus berupaya untuk mengedepankan transparansi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat diakses melalui *official website* PTA Padang www.pta-padang.go.id.

Dengan rasa bangga saya sampaikan capaian-capaian yang telah diperoleh PTA Padang dan PA se-Sumatera Barat sepanjang tahun 2023 merupakan hasil dari kerja keras dan kerja cerdas kita bersama dalam upaya menghadapi berbagai tantangan dan kondisi melalui optimalisasi peradilan modern berkelanjutan.

Khusus kepada Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 PTA Padang, terima kasih atas kerja sama dan kerja keras saudara sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat tersusun dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 30 Januari 2024
Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Padang


Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
NIP. 195807051986031001

MAKNA LAMBANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG





Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H, M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lahir di Tapanuli Selatan, 5 Juni 1958 dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak tanggal 8 Desember 2023 menggantikan Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan yang pernah dijabatnya antara lain Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige, Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Hakim Tinggi Mahkamah Syari'ah Aceh, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Aceh, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Beliau meraih sarjana Hukum Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1985, Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2000. Magister Hukum diselesaikan tahun 2004 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, sedangkan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jambi pada tahun 2018. Dimasa Kepemimpinannya, berhasil mengantarkan PTA Medan meraih predikat WBK pada tahun 2023.



Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lahir di Tanjung Karang, 8 Oktober 1963 dan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak 19 Juni 2023. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Padang, Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Ketua Pengadilan Agama Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi, Ketua Pengadilan Agama Jambi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Sarjana Hukum Islam diperoleh tahun 1987 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998, dan gelar Magister Hukum Islam dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2010. Saat mengabdikan sebagai Ketua Pengadilan Agama Jambi dan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil menjadi salah satu tokoh keberhasilan kedua satker tersebut memperoleh predikat WBK.

PERISTIWA PENTING 2023

10 Mei 2023



PTUN Pekanbaru Lakukan Studi Tiru ke PTA Padang
Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima kedatangan rombongan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam rangka studi tiru untuk melihat langsung proses pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di PTA Padang.

15 Juni 2023



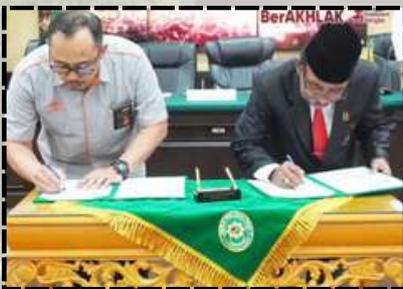
Pembinaan oleh Ketua Umum DPP IKAH
Pembinaan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Hakim Indonesia YM. Dr. Drs. H. Yasardin, S.H, M.Hum. pada Peradilan Agama se-wilayah Sumatera Barat.

19 Juni 2023



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Wakil Ketua PTA Padang
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melantik Dra. Hj. Rosliani, S.H, M.A. menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Ruang *Command Centre* H. Mansur DT Nagari Basa PTA Padang.

20 Juni 2023



Penandatanganan MoU dengan PT Pos Indonesia
Penandatanganan Implementasi Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Dengan PT Pos Indonesia terkait Pengiriman Dokumen Surat Tercatat yang dilakukan oleh Ketua PTA Padang dan Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Padang.

18 Juli 2023



Ziarah Makam Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa
Dalam Rangka menyambut Milad PTA Padang ke 65 pada tanggal 1 Agustus 2023, dilakukan serangkaian acara salah satunya adalah Ziarah & Tabur Bunga Makam Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa di Kamang Mudiak, Tilatang Kamang, Kab, Agam pada tanggal 18 Juli 2023.

1 Agustus 2023



Tasyakuran Milad ke-65 PTA Padang
Acara Tasyakuran Milad PTA Sumatera Barat dilakukan di halaman samping Kantor PTA Sumatera Barat. Acara dilakukan setelah upacara bendera peringatan hari milad.

PERISTIWA PENTING 2023

6 Agustus 2023



Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial 2023

Minggu, 6 Agustus 2023

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., .M.H. dan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru.

17 Agustus 2023



Peringatan HUT RI Ke-78 Kemerdekaan RI

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 bertempat di Halaman Istana Gubernur Sumatera Barat.

14 Agustus 2023



PTA Padang Laksanakan Pemusnahan Arsip

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip yang baik, setelah memperoleh persetujuan Kepala Arsip Nasional RRI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI PTA Padang melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip. Kegiatan dimulai secara simbolis oleh KPTA Padang Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

19 Agustus 2023



Serah Terima Korwil DIPA 04 PA Padang ke PTA Padang

Merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 630/SEK/SK/VII/2023 tentang Tim Pengelola Sistem Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dirjen Badilag.

15 Agustus 2023



PTA Padang Raih Peringkat 1 UAPPA 2022 Kanwil DJPb Sumbar

PTA Padang meraih Peringkat 1 Kategori Laporan Keuangan Unit Akutansi Pengguna Anggaran (UAPPA) Wilayah Tahun 2022 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah.

5 September 2023



KPTA Padang Jadi Narasumber Studium General di UIN M. Yunus Batusangkar

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menjadi pemateri dalam kegiatan Studium General yang bertema "Problematika Penegakan Hukum di Pengadilan Agama" di Aula Gedung I UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 4 September 2023.

PERISTIWA PENTING 2023

6 September 2023



Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP PTA Padang tahun 2022

Penyampaian LHE AKIP PTA Padang oleh Evaluator Badan Pengawasan MA RI ini dilaksanakan melalui virtual meeting yang oleh Ketua, Wakil Ketua PTA Padang, dan seluruh Aparatur PTA Padang.

14 September 2023



PTA Padang Raih Penghargaan dari KPPN

Kategori penghargaan yang diterima adalah Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I tahun 2023 Pagu Sedang dengan Peringkat Keempat(4)

1 Oktober 2023



Peringatan HUT Provinsi Sumatera Barat ke-78

Wakil Ketua PTA Padang Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A menghadiri kegiatan Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-78 yang bertempat di Kantor DPRD Sumatera Barat.

12 Oktober 2023



Silaturahmi KPTA Padang ke Mahkamah Agung RI

Memasuki masa purnabakti akhir Bulan November 2023, Dr. Drs. H. Pelmizar, M.HI Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dan pamitan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

26 Oktober 2023



Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU)

Ketua PTA Padang dan rombongan menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Koto Baru dengan Instansi Vertikal dan SKPD Teknis Pemerintah Kabupaten Solok terkait layanan hukum di Pengadilan Agama Koto Baru.

20 November 2023



Silaturahmi KPTA Padang ke Gubernur Sumatera Barat

Kunjungan dilaksanakan dalam rangka silaturahmi dan apresiasi kerjasama yang telah terjalin selama Bapak Dr. Drs. Pelmizar, M.H.I. bertugas di PTA Padang. Pada kesempatan tersebut beliau juga berpamitan kepada Gubernur selaku Pemda Provinsi Sumatera Barat karena beliau akan memasuki masa purnabakti pada mulai tanggal 1 Desember 2023.

PERISTIWA PENTING 2023

4 Desember 2023



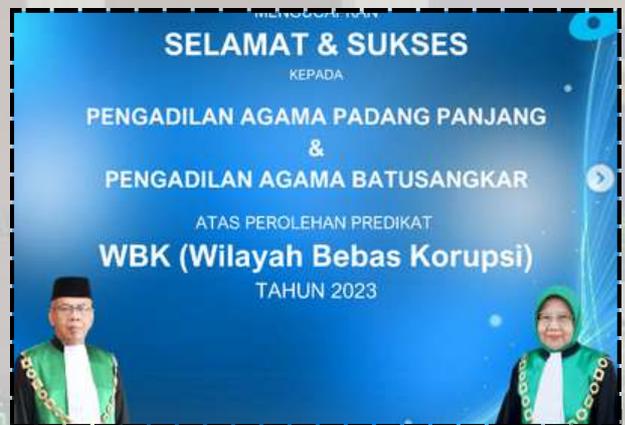
Upacara Purnabakti Ketua PTA Padang

Upacara Wisuda Purnabakti Ketua PTA Padang, Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I., diselenggarakan secara virtual di Command Centre H. Mansur Dt Nagari Basa PTA Padang. Acara berlangsung khidmat mulai dari pembukaan, pengantar kata oleh Ketua Mahkamah Agung RI, penanggalan kalung dan tanda jabatan, pemberian plakat dan buket bunga hingga prosesi kirab wisuda purnabakti.

4 Desember 2023

PA Batusangkar dan PA Padang Panjang Meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2023

Senin, 4 Desember 2023, Mahkamah Agung mengumumkan satuan kerja yang meraih WBK melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 tentang Daftar Satuan Kerja Memenuhi Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2023.



8 Desember 2023



Pelantikan Ketua PTA Padang oleh Ketua MA RI

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang beserta dengan pelantikan empat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lainnya. Pelantikan ini digelar di ruang Kusumaatmadja lantai 14, gedung Mahkamah Agung RI.

21 Desember 2023

Anugerah 3 Besar Badan Publik Monev 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abdul Hamid Pulungan, S.H., M.H. menghadiri kegiatan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Achievement Motivation Person yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II MANAJEMEN PERKARA	7
Keadaan Perkara	
Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	8
Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	11
Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	12
Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	13
Penyelesaian Perkara	
Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	14
Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	15
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.....	17
Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi.....	20
Capaian Prioritas Nasional	
Posbakum.....	22
Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	24
Perkara Prodeo.....	26
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	27
Mutasi.....	35
Promosi.....	36
Pensiun.....	37
Diklat (SDM Teknis/Non Teknis).....	38
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	40
Pengelolaan Keuangan.....	41
Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	53
Pengelolaan Teknologi Informasi.....	71
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	81
Pembangunan Zona Integritas.....	82
Pelayanan Terpadu Satu pintu.....	85
Inovasi Pelayanan Publik.....	87
BAB VI PENGAWASAN	93
Internal.....	94
Evaluasi.....	94
BAB VII PENUTUP	97
Kesimpulan.....	98
Rekomendasi.....	99

BAB I

Pendahuluan



VISI

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung

MISI

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang**



Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wilayah yurisdiksi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai tugas yang strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain berkaitan dengan pembinaan/pengawasan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparaturnya Pengadilan Agama dalam mewujudkan pelayanan yang prima bagi semua masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama se- Sumatera Barat sebagai bagian etalase Peradilan se Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Padang ditunjuk sebagai koordinator wilayah (Korwil) untuk 38 (tiga puluh delapan) Pengadilan se Sumatera Barat baik Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN dan Pengadilan Militer.

Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan arah kebijakan dalam mendukung peningkatan kinerja dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat dengan memprioritaskan ketersediaannya sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan capaian yang tersedia dalam DIPA satuan kerja masing-masing. dalam mendukung transparansi peradilan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat telah mempunyai jaringan internet dan teknologi yang baik sehingga semua informasi yang dapat diakses melalui website yang memberikan kemudahan dalam layanan informasi bagi pencari keadilan dan masyarakat miskin terpinggirkan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Hal ini menjadi salah satu upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Laporan Pelaksanaan Kegiatan selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.



TUJUAN STRATEGIS

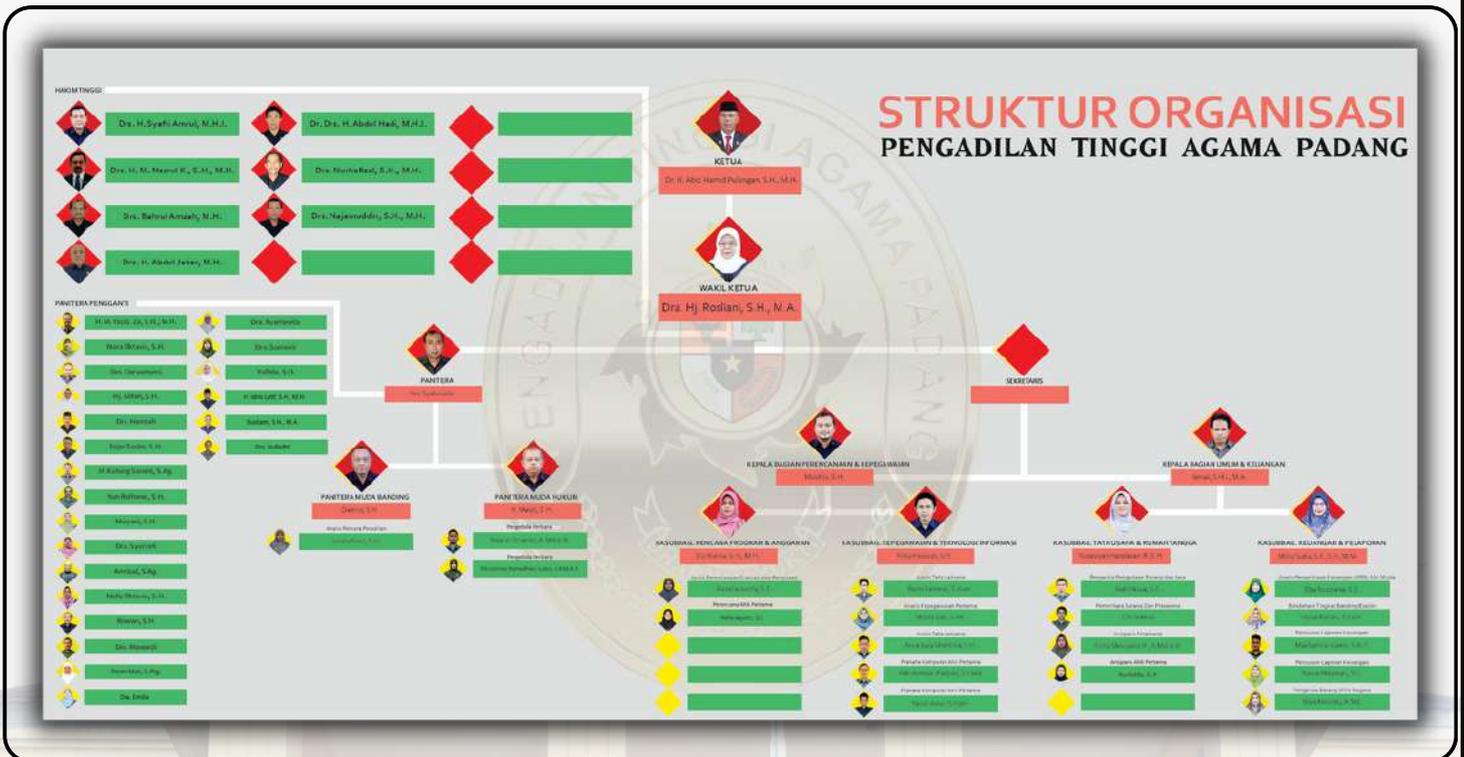
1. Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan
2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang



SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya Dukungan dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding

STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa: "Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita".

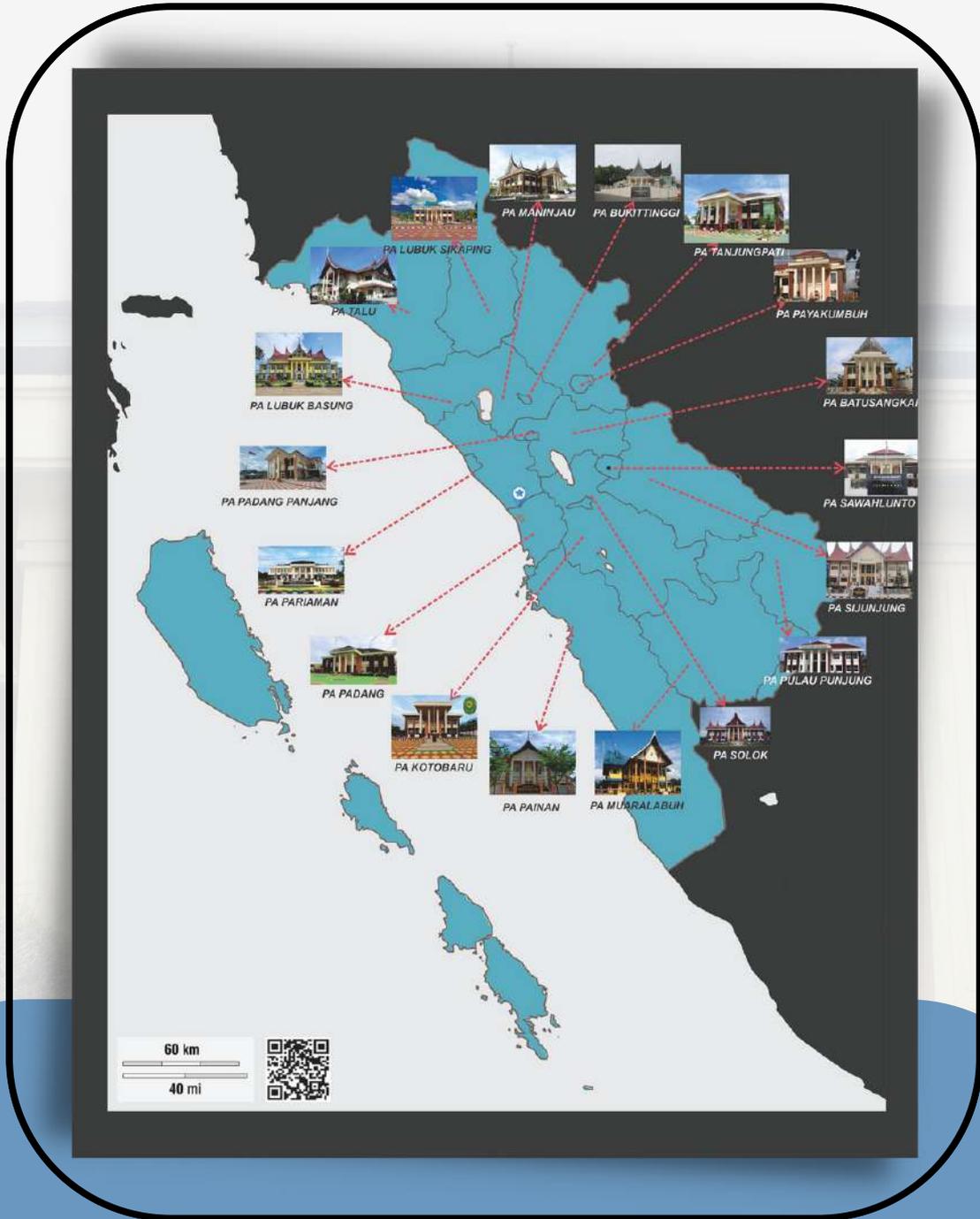
Untuk Kepaniteraan Peradilan Agama diatur dalam Bab II Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah melakukan pemisahan antara kepaniteraan dan kesekretariatan. Sehingga yang menangani administrasi perkara dipimpin oleh seorang Panitera dan administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pada dasarnya kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh Panitera Muda Banding, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti.

Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan supporting unit yang berfungsi sebagai tata usaha Pengadilan Agama dalam mengelola manajemen perkantoran (administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, teknologi informasi dan keuangan). Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang terdiri dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.



WILAYAH YURISDIKSI



Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wilayah yurisdiksi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, yakni dengan satker kelas 1 A sebanyak 1 (satu) satuan kerja, kelas 1B sebanyak 5 (lima) satuan kerja, dan kelas 2 sebanyak 12 satuan kerja.

BAB II

Manajemen Perkara



I KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2023

Pelayanan perkara sudah berjalan sesuai ketentuan dengan dukungan SDM, aplikasi SIPP, serta indikator kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

Sisa perkara tahun 2023 berjumlah 223 perkara, disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

- Jumlah perkara yang ditangani dan kualitas perkara yang berbeda.
- Salah satu pihak ghaib/tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah RI, oleh karena itu pemanggilannya melalui pengumuman surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan pengadilan dengan tenggat waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dengan kedua dan tenggat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan (pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).
- Salah satu pihak berstatus PNS/bekerja di BUMN sehingga harus menunggu ijin atasan untuk perceraianya.
- Perkara yang didaftarkan pada akhir tahun 2023.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama PTA Padang Tahun 2023								
No	Satker	Sisa 2022	Diterima 2023	Jumlah Perkara 2023	Diputus		Sisa 2023	
					Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PA Padang	55	1964	2019	1979	98%	40	1,98%
2	PA Pariaman	8	1248	1256	1250	100%	6	0,48%
3	PA Batusangkar	13	681	694	670	97%	24	3,46%
4	PA Bukittinggi	72	949	1021	950	93%	71	6,95%
5	PA Payakumbuh	12	789	801	786	98%	15	1,87%
6	PA Sawahlunto	0	233	233	233	100%	0	0,00%
7	PA Solok	2	412	414	412	100%	2	0,48%
8	PA Padang Panjang	4	387	391	384	98%	7	1,79%
9	PA Muara Labuh	4	348	352	351	100%	1	0,28%
10	PA Sijunjung	7	475	482	476	99%	6	1,24%
11	PA Koto Baru	1	864	865	864	100%	1	0,12%
12	PA Painan	7	913	920	907	99%	13	1,41%
13	PA Lubuk Sikaping	15	773	788	788	100%	0	0,00%
14	PA Talu	29	973	1002	972	97%	30	2,99%
15	PA Maninjau	4	208	212	209	99%	3	1,42%
16	PA Tanjung Pati	10	549	559	552	99%	7	1,25%
17	PA Lubuk Basung	6	457	463	461	100%	2	0,43%
18	PA Pulau Punjung	11	532	543	536	99%	7	1,29%
Jumlah		260	12.755	13.015	12.780		235	

Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama tahun 2023 sejumlah 12.780 perkara (sisa perkara tahun 2022 ditambah dengan penerimaan tahun 2023 sejumlah 12.755) sudah mencapai target, yaitu sebanyak 12.780 perkara (98,19%) dan sisa 235 perkara (1,81%), sejalan dengan instruksi dari Ketua Mahkamah Agung RI bahwa untuk sisa perkara seharusnya tidak lebih dari 10%, dan sebagaimana data di atas terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pada tahun 2023 Pengadilan Agama sewilayah Sumatera Barat lebih dari 98%. hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perkara sudah berjalan sesuai ketentuan dengan dukungan SDM dan Aplikasi SIPP serta sarana penunjang lainnya serta Indikator Kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2023

NOMOR	PENGADILAN AGAMA	A. PERKAWINAN																															
		Izin Poligami	Perubahan Perkawinan	Perkawin Perk. Oleh PPH	Pembatalan Perkawinan	Isbatnik Nikah/Kawin Sireh	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Perkawinan Anak	Nikah Anak Oleh Ibu	Hik-tak Bekas Isbatnik	Pengakuan Anak/Pengangkatan Anak	Pencegahan Perk. Orang Tua	Perwalian	Perkeb. Hak Wanita Wali	Perkawin. Orang lain Sng/Wali	Ganti Ragi Tn/Wali	Asal Usul Anak	Perk. Kawin Campuran	Isbatnik	Isbatnik	Isbatnik	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wasiat	G. Zakat / Infaq / Sadaqah	H. PPH/P. Penetapan Ahli Waris	I. Lain-lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	PADANG	3	-	-	5	-	370	1.022	15	7	-	2	-	61	1	-	-	5	-	302	-	43	10	2	22	-	-	-	-	72	24	1.564	
2	PARIAMAN	2	-	-	-	-	204	730	-	3	-	-	-	6	-	-	-	10	-	181	-	28	2	1	1	-	-	-	-	18	2	1.245	
3	BATUSANGKAR	-	-	-	1	-	123	427	-	1	-	-	-	3	-	-	-	5	-	71	-	38	6	-	2	-	-	-	-	3	1	681	
4	BUKITTINGGI	-	-	-	3	-	155	543	7	4	-	-	2	-	9	-	-	51	-	84	-	10	7	-	2	-	-	-	-	19	7	945	
5	PAYAKUMBUH	-	-	-	3	-	168	463	2	6	-	-	-	16	-	-	-	6	-	58	-	38	3	-	7	-	-	-	-	15	6	788	
6	SAWAHLUNTO	-	-	-	-	-	42	132	1	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	23	-	23	1	1	-	-	-	-	2	2	233		
7	SOLOK	-	-	-	2	-	94	230	1	3	-	-	-	1	3	-	-	4	-	40	-	19	2	2	4	-	-	-	4	3	412		
8	PADANG PANJANG	-	-	-	-	-	70	241	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	39	-	20	2	2	2	-	-	-	-	4	1	387		
9	TAMARA LABUH	-	-	-	-	-	48	194	1	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	53	-	42	1	-	-	-	-	-	-	2	548		
10	SUJUNG	-	-	-	-	-	62	196	-	1	-	-	-	1	-	-	-	10	-	120	-	77	1	4	-	-	-	-	-	-	3	475	
11	KOTO BARU	-	-	-	-	-	164	455	2	1	-	-	-	3	-	-	-	6	-	90	-	135	5	-	1	-	-	-	2	-	864		
12	PAINAN	-	-	-	1	-	153	543	4	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	133	-	27	1	-	2	-	-	-	2	1	913		
13	LUBUK SIKAPING	-	-	-	-	-	108	283	3	2	-	-	1	-	6	-	-	4	-	311	-	40	4	-	6	-	-	-	4	1	773		
14	TALU	3	-	-	-	-	164	467	5	2	-	-	-	14	-	-	-	4	-	208	-	75	4	4	5	-	-	-	13	4	973		
15	TAMINJAU	-	-	-	-	-	38	119	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	31	-	11	1	-	-	-	-	-	5	-	208		
16	KABUPATEN SO KOTA	2	-	-	-	-	107	329	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	-	42	-	47	3	-	-	-	-	-	4	4	549		
17	LUBUK BASUNG	-	-	-	-	-	50	283	3	2	-	-	-	4	-	-	-	2	-	83	-	19	2	-	1	-	-	1	3	4	457		
18	PULAU PUNJUNG	1	-	-	-	-	85	230	1	-	-	-	-	6	-	-	-	7	-	158	-	37	2	1	-	-	-	-	4	-	532		
	JUMLAH	11	-	-	15	-	2.285	6.553	44	34	-	2	3	1	157	1	-	125	-	2.028	-	729	57	17	55	-	-	1	-	172	65	12.755	

Pada tahun 2023, total jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebanyak 12.755 perkara. Jenis perkara terbanyak yang diterima adalah perkara cerai gugat sebanyak 6.953 perkara, disusul perkara cerai talak sebanyak 2.283 perkara, isbatnik nikah 2.028 perkara, dispensasi kawin 729 perkara, penetapan ahli waris 172 perkara, Perwalian 157 perkara, wali adhol 57 perkara, harta bersama 44 perkara dan perkara lainnya seperti Kewarisan, Asal Usul Anak, Ekonomi Syariah, Pembatalann Perkawinan, Pencegahan perkawinan, Izin Poligami, Penguasaan Anak, dan Lain Lain sebanyak 332 perkara



**REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA
SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2023**

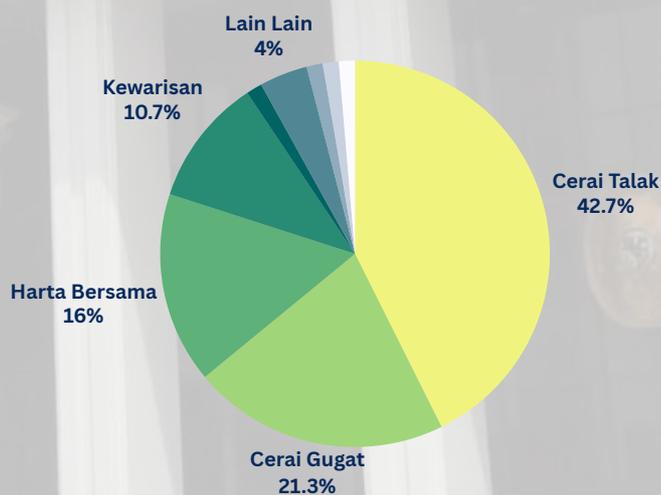
NOMOR	PENGADILAN AGAMA	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	DICABUT																	Jumlah	Sisa Akhir Tahun	Perkara Yang Sudah Diminutasi	Keterangan (*)															
					Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali					Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat / Infaq / Shodaqoh	H. P3HP / Penetapan Ahli Waris	I. Lain-lain	Ditolak
1	PADANG	55	1.964	2.019	229	2	-	-	-	1	311	811	5	4	-	-	-	45	1	-	-	5	213	40	8	-	6	-	-	-	5	45	13	81	60	32	2	1.379	40	1.379
2	PARIAMAN	8	1.248	1.256	30	2	-	-	-	-	178	729	-	3	-	-	-	5	-	-	-	154	-	27	2	-	-	-	-	-	3	2	8	6	26	2	1.250	6	1.250	
3	BATUSANGKAR	13	681	694	45	-	-	-	-	-	100	378	-	-	-	-	-	3	-	-	-	51	-	37	3	-	-	-	-	-	-	-	1	14	17	16	670	24	670	
4	BUKITINGGI	72	343	1.021	128	-	-	-	-	2	158	464	2	1	-	-	-	8	-	-	-	61	-	7	6	1	-	-	-	-	-	14	5	16	11	24	350	71	350	
5	PAYAKUMBUH	12	789	801	136	-	-	-	-	1	123	386	1	4	-	-	-	14	-	-	-	31	-	30	3	-	-	-	-	-	-	7	2	8	12	22	1	786	15	786
6	SAWAHLINTO	-	233	233	23	-	-	-	-	-	30	109	-	2	-	-	-	3	-	-	-	12	-	17	-	1	-	-	-	-	-	2	2	24	6	2	233	-	233	
7	SOLOK	4	412	414	61	-	-	-	-	-	66	195	-	2	-	-	-	2	-	-	-	27	-	15	2	2	1	-	-	-	-	1	2	3	17	3	2	412	2	412
8	PADANG PANJANG	4	387	391	37	-	-	-	-	-	59	213	-	-	-	-	-	4	-	-	-	32	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	3	1	384	7	384
9	MUARA LABUH	4	348	352	30	-	-	-	-	-	36	168	1	-	-	-	-	6	-	-	-	38	-	34	-	-	-	-	-	-	-	2	2	21	9	5	351	1	351	
10	SUAMUNG	7	475	482	8	-	-	-	-	-	57	184	-	-	-	-	-	1	-	-	-	104	-	70	-	3	-	-	-	-	-	2	17	21	5	476	6	476		
11	KOTO BARU	1	864	865	47	-	-	-	-	-	127	407	-	-	-	-	-	2	-	-	-	36	-	125	3	-	-	-	-	-	2	1	19	22	864	1	864			
12	PAIMAN	7	913	920	21	-	-	-	-	-	85	435	3	-	-	-	-	3	-	-	-	60	-	16	1	-	-	-	-	-	1	1	82	43	23	907	13	907		
13	LUBUK SIKAPING	15	773	788	47	-	-	-	-	-	85	250	2	2	-	-	-	6	-	-	-	263	-	35	1	-	1	-	-	-	1	1	17	36	39	788	-	788		
14	TALU	29	973	1.002	48	2	-	-	-	-	143	431	1	1	-	-	-	12	-	-	-	163	-	65	-	1	1	-	-	-	6	2	20	25	41	972	30	972		
15	MAHIMAU	4	208	212	12	-	-	-	-	-	31	108	-	-	-	-	-	2	-	-	-	22	-	10	-	-	-	-	-	-	1	3	11	4	4	209	3	209		
16	TAMUJUNG PATI	10	549	559	22	1	-	-	-	-	30	239	-	-	-	-	-	5	-	-	-	33	-	35	3	-	-	-	-	-	1	3	29	14	11	552	7	552		
17	LUBUK BASUNG	6	457	463	35	-	-	-	-	-	46	258	-	-	-	-	-	4	-	-	-	68	-	18	1	-	-	-	-	-	2	3	18	3	2	461	2	461		
18	PULAU PUNJUNG	11	532	543	31	1	-	-	-	-	77	214	-	-	-	-	-	4	-	-	-	134	-	34	2	1	-	-	-	-	2	2	14	4	11	536	7	536		
	JUMLAH	260	12.755	13.015	1.050	8	-	-	-	3	1.873	6.159	15	18	-	-	-	129	1	-	-	1.508	-	635	36	10	10	-	-	-	11	101	41	477	302	288	7	12.780	235	12.780

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat telah memutus 12.780 perkara. Jenis perkara yang diputus antara lain: Perkara cerai gugat sebanyak 6.159 perkara; Cerai Talak sebanyak 1.873 perkara; Itsbat Nikah sebanyak 1.508 perkara; Dispensasi Kawin 635 perkara; Kewarisan 10 perkara; Perkara Ekonomi Syariah sebanyak 10 Perkara; Perkara lainnya seperti Izin Poligami, Harta Bersama, Penguasaan Anak, Wali Adhol dan lain sebagainya sebanyak 2.585 Perkara.

KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berhasil menyelesaikan semua beban perkara pada tahun 2023. Dari 75 perkara yang diterima, telah diputus 75 perkara (100%) sehingga tidak terdapat sisa perkara pada tahun 2023.

Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Padang Tahun 2023							
No	Satker	Sisa 2022	Diterima 2023	Diputus		Sisa 2023	
				Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PA Padang	0	19	19	100%	0	0%
2	PA Pariaman	0	5	5	100%	0	0%
3	PA Batusangkar	0	2	2	100%	0	0%
4	PA Bukittinggi	0	12	12	100%	0	0%
5	PA Payakumbuh	0	6	6	100%	0	0%
6	PA Sawahlunto	0	1	1	100%	0	0%
7	PA Solok	0	4	4	100%	0	0%
8	PA Padang Panjang	0	1	1	100%	0	0%
9	PA Muara Labuh	0	1	1	100%	0	0%
10	PA Sijunjung	0	0	0	-	0	0%
11	PA Koto Baru	0	1	1	100%	0	0%
12	PA Painan	0	4	4	100%	0	0%
13	PA Lubuk Sikaping	0	3	3	100%	0	0%
14	PA Talu	0	8	8	100%	0	0%
15	PA Maninjau	0	0	0	-	0	0%
16	PA Tanjung Pati	0	4	4	100%	0	0%
17	PA Lubuk Basung	0	4	4	100%	0	0%
18	PA Pulau Punjung	0	0	0	-	0	0%
Jumlah		0	75	75			



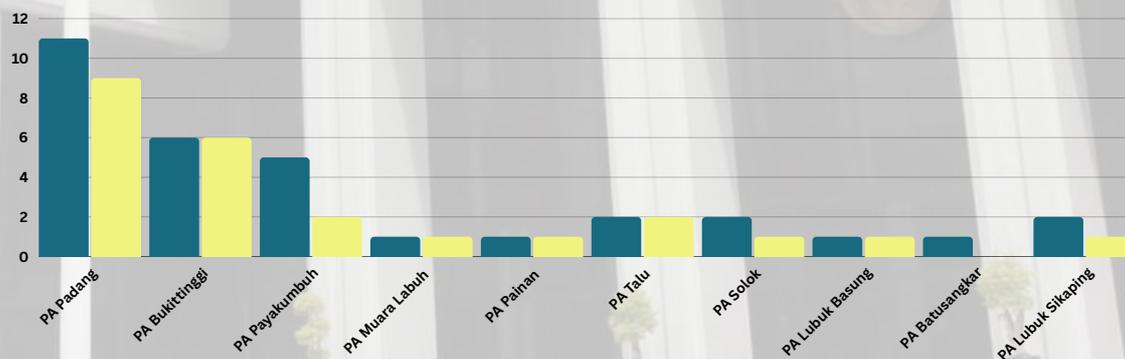
Berdasarkan jenis perkara, dari 75 Perkara yang diajukan banding, Cerai Talak merupakan perkara terbanyak yang ditangani yaitu sebesar 32 Perkara (42,7%), selanjutnya disusul dengan perkara cerai gugat sebanyak 16 perkara (21,3%), harta bersama 12 perkara (16%), kewarisan 8 perkara (10,7%), perkara lain-lain 3 perkara (4%), ekonomi syariah, penguasaan anak, hibah, dan isbath Nikah masing masing 1 perkara (1,3%).

KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI TAHUN 2023

Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Padang dan dapat diajukan dalam tenggat waktu 14 hari sejak tanggal putusan diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama yang memutuskan perkara tersebut.

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus perkara tingkat banding sebanyak 75 perkara dan yang diajukan upaya hukum Kasasi tahun 2023, sebanyak 32 perkara (43%), sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 43 perkara (57%), secara umum masyarakat puas atas putusan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terinci dalam tabel dibawah ini.

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi PTA Padang Tahun 2023			
No	Satker	Perkara Kasasi Tahun 2023	Perkara Kasasi Diputus Tahun 2023
1	PA Padang	11	9
2	PA Pariaman	0	0
3	PA Batusangkar	1	0
4	PA Bukittinggi	6	6
5	PA Payakumbuh	5	2
6	PA Sawahlunto	0	0
7	PA Solok	2	1
8	PA Padang Panjang	0	0
9	PA Muara Labuh	1	1
10	PA Sijunjung	0	0
11	PA Koto Baru	0	0
12	PA Painan	1	1
13	PA Lubuk Sikaping	2	1
14	PA Talu	2	2
15	PA Maninjau	0	0
16	PA Tanjung Pati	0	0
17	PA Lubuk Basung	1	1
18	PA Pulau Punjung	0	0
JUMLAH		32	24



KEADAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK) TAHUN 2023

Upaya hukum Peninjauan Kembali disebut juga sebagai upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila ditemukan adanya novum atau keadaan yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, dimana penemuan novum tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan.

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) PTA Padang Tahun 2023			
No	Satker	Perkara PK Tahun 2023	Perkara PK Diputus Tahun 2023
1	PA Padang	0	0
2	PA Pariaman	0	0
3	PA Batusangkar	1	1
4	PA Bukittinggi	2	2
5	PA Payakumbuh	0	0
6	PA Sawahlunto	0	0
7	PA Solok	0	0
8	PA Padang Panjang	0	0
9	PA Muara Labuh	0	0
10	PA Sijunjung	0	0
11	PA Koto Baru	0	0
12	PA Painan	0	0
13	PA Lubuk Sikaping	0	0
14	PA Talu	0	0
15	PA Maninjau	0	0
16	PA Tanjung Pati	0	0
17	PA Lubuk Basung	0	0
18	PA Pulau Punjung	0	0
Jumlah		3	3

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat tahun 2023 sebanyak 3 perkara, dan telah mendapatkan putusan dari upaya hukum PK tersebut.





I PENYELESAIAN PERKARA

● JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN 2023

Sisa perkara tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sejumlah 260 perkara, telah berhasil diselesaikan pada tahun 2023 seluruhnya sebanyak 260 perkara atau (100%). Berikut tabel penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021, di bawah ini:

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2023 di PTA Padang					
No	Satker	Sisa Tahun 2022	Sisa Perkara Diputus Tahun 2023	(%)	Sisa
1	PTA Padang	0	0	100%	0
2	PA Padang	55	55	100%	0
3	PA Pariaman	8	8	100%	0
4	PA Batusangkar	13	13	100%	0
5	PA Bukittinggi	72	72	100%	0
6	PA Payakumbuh	12	12	100%	0
7	PA Sawahlunto	0	0	100%	0
8	PA Solok	2	2	100%	0
9	PA Padang Panjang	4	4	100%	0
10	PA Muara Labuh	4	4	100%	0
11	PA Sijunjung	7	7	100%	0
12	PA Koto Baru	1	1	100%	0
13	PA Painan	7	7	100%	0
14	PA Lubuk Sikaping	15	15	100%	0
15	PA Talu	29	29	100%	0
16	PA Maninjau	4	4	100%	0
17	PA Tanjung Pati	10	10	100%	0
18	PA Lubuk Basung	6	6	100%	0
19	PA Pulau Punjung	11	11	100%	0
Jumlah		260	260	100%	0

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU TAHUN 2023

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan untuk tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Berikut disajikan statistik penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama Pengadilan Agama se Sumatera Barat. Dari 12.840 perkara yang diselesaikan pada tahun 2023, dapat dikelompokkan menjadi penyelesaian perkara 1 s/d 3 bulan sejumlah 12.125 penyelesaian perkara 3 s/d 5 bulan sejumlah 684 dan penyelesaian perkara melebihi 5 bulan yaitu 31 perkara.

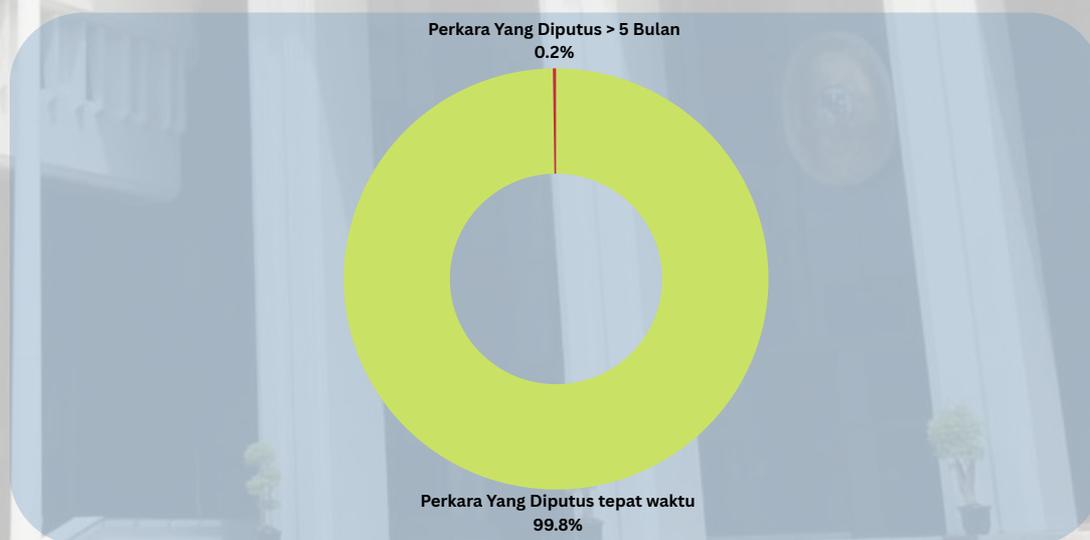
Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Pada Tahun 2023				
PA se-Sumatera Barat				
No	Satker	Diputus 1-3 Bulan	Diputus 4-5 Bulan	Diputus >5 Bulan
1	PTA Padang	75	0	0
2	PA Padang	1814	155	8
3	PA Pariaman	1166	76	4
4	PA Batusangkar	607	63	0
5	PA Bukittinggi	850	99	1
6	PA Payakumbuh	759	25	2
7	PA Sawahlunto	213	19	0
8	PA Solok	400	9	2
9	PA Padang Panjang	356	28	0
10	PA Muara Labuh	341	10	0
11	PA Sijunjung	466	9	1
12	PA Koto Baru	846	17	1
13	PA Painan	865	38	4
14	PA Lubuk Sikaping	755	33	0
15	PA Talu	919	39	6
16	PA Maninjau	189	20	0
17	PA Tanjung Pati	532	19	0
18	PA Lubuk Basung	448	11	2
19	PA Pulau Punjung	524	14	0
Jumlah		12.125	684	31

Adanya perkara yang tidak tepat waktu disebabkan beberapa faktor antara lain karena tahap pembuktian membutuhkan waktu yang lebih panjang karena cukup banyaknya objek sengketa, kemudian objek sengketa sebagian berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama, proses mediasi yang membutuhkan waktu dalam penyelesaian sengketa secara damai, serta Ketidakhadiran Penggugat dan tergugat dalam tahap pembuktian

PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2023

Perkara yang diputus tepat waktu oleh PTA Padang dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Padang sudah mencapai 12.809 perkara dari jumlah perkara putus sebanyak 12.840 atau mencapai 99,76 %. Seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Jumlah Perkara yang Diputus Pada Tahun 2023 PA se-Sumatera Barat				
No	Satker	Jumlah Perkara Putus	Perkara yang Diputus Tepat Waktu	(%) Perkara yang Diputus Tepat Waktu
1	PTA Padang	75	75	100,00%
2	PA Padang	1977	1969	99,60%
3	PA Pariaman	1246	1242	99,68%
4	PA Batusangkar	670	670	100,00%
5	PA Bukittinggi	950	949	99,89%
6	PA Payakumbuh	786	784	99,75%
7	PA Sawahlunto	232	232	100,00%
8	PA Solok	411	409	99,51%
9	PA Padang Panjang	384	384	100,00%
10	PA Muara Labuh	351	351	100,00%
11	PA Sijunjung	476	475	99,79%
12	PA Koto Baru	864	863	99,88%
13	PA Painan	907	903	99,56%
14	PA Lubuk Sikaping	788	788	100,00%
15	PA Talu	964	958	99,38%
16	PA Maninjau	209	209	100,00%
17	PA Tanjung Pati	551	551	100,00%
18	PA Lubuk Basung	461	459	99,57%
19	PA Pulau Punjung	538	538	100,00%
Jumlah		12.840	12.809	99,76%



JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2023

Perkara yang diajukan upaya hukum banding oleh para pihak pada tahun 2023 berjumlah 75 perkara dari total 12.765 perkara yang diputus Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang atau sebanyak 12.690 (99,41%) perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Hal ini menjadi indikasi bahwa secara umum masyarakat pencari keadilan puas terhadap Putusan Pengadilan.

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023 PA se-Sumatera Barat						
No	Satker	Perkara yang Diputus Tk.I Tahun 2023	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023		Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PA Padang	1977	19	0,96%	1958	99,04%
2	PA Pariaman	1246	5	0,40%	1241	99,60%
3	PA Batusangkar	670	2	0,30%	668	99,70%
4	PA Bukittinggi	950	12	1,26%	938	98,74%
5	PA Payakumbuh	786	6	0,76%	780	99,24%
6	PA Sawahlunto	232	1	0,43%	231	99,57%
7	PA Solok	411	4	0,97%	407	99,03%
8	PA Padang Panjang	384	1	0,26%	383	99,74%
9	PA Muara Labuh	351	1	0,28%	350	99,72%
10	PA Sijunjung	476	0	0,00%	476	100,00%
11	PA Koto Baru	864	1	0,12%	863	99,88%
12	PA Painan	907	4	0,44%	903	99,56%
13	PA Lubuk Sikaping	788	3	0,38%	785	99,62%
14	PA Talu	964	8	0,83%	956	99,17%
15	PA Maninjau	209	0	0,00%	209	100,00%
16	PA Tanjung Pati	551	4	0,73%	547	99,27%
17	PA Lubuk Basung	461	4	0,87%	457	99,13%
18	PA Pulau Punjung	538	0	0,00%	538	100,00%
Jumlah		12.765	75	0,59%	12.690	99,41%



JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA KASASI TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus perkara tingkat banding sebanyak 75 perkara dan upaya hukum kasasi yang diajukan adalah sebanyak 32 perkara (42,67%), sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 43 perkara (57,33%). Dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat puas atas putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Padang).

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023					
PA se-Sumatera Barat					
No	Satker	Perkara yang Diputus Tk. Banding Tahun 2023	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	
				Jumlah	(%)
1	PA Padang	19	11	8	42,11%
2	PA Pariaman	5	0	5	100,00%
3	PA Batusangkar	2	1	1	50,00%
4	PA Bukittinggi	12	6	6	50,00%
5	PA Payakumbuh	6	5	1	16,67%
6	PA Sawahlunto	1	0	1	100,00%
7	PA Solok	4	2	2	50,00%
8	PA Padang Panjang	1	0	1	100,00%
9	PA Muara Labuh	1	1	0	0,00%
10	PA Sijunjung	0	0	0	-
11	PA Koto Baru	1	0	1	100,00%
12	PA Painan	4	1	3	75,00%
13	PA Lubuk Sikaping	3	2	1	33,33%
14	PA Talu	8	2	6	75,00%
15	PA Maninjau	0	0	0	-
16	PA Tanjung Pati	4	0	4	100,00%
17	PA Lubuk Basung	4	1	3	75,00%
18	PA Pulau Punjung	0	0	0	-
Jumlah		75	32	43	57,33%



JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) TAHUN 2023

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat Banding maupun Perkara yang diputus Kasasi yang diajukan Peninjauan Kembali tahun 2023 sebanyak 4 Perkara. Perkara tingkat I sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang diputus sejumlah 12.765 perkara, sedangkan yang diputus pada tingkat banding 75 perkara, dan yang diputus Kasasi ada 32 perkara dan yang diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ada 4 Perkara, sehingga Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2023 jumlahnya 12.761 perkara (99,97%).

No	Satker	Perkara yang Diputus TK I /Banding/ Kasasi	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2023		Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2023	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	PA Padang	1977	3	0,15%	1974	99,85%
2	PA Pariaman	1246	0	0,00%	1246	100,00%
3	PA Batusangkar	670	1	0,15%	669	99,85%
4	PA Bukittinggi	950	0	0,00%	950	100,00%
5	PA Payakumbuh	786	0	0,00%	786	100,00%
6	PA Sawahlunto	232	0	0,00%	232	100,00%
7	PA Solok	411	0	0,00%	411	100,00%
8	PA Padang Panjang	384	0	0,00%	384	100,00%
9	PA Muara Labuh	351	0	0,00%	351	100,00%
10	PA Sijunjung	476	0	0,00%	476	100,00%
11	PA Koto Baru	864	0	0,00%	864	100,00%
12	PA Painan	907	0	0,00%	907	100,00%
13	PA Lubuk Sikaping	788	0	0,00%	788	100,00%
14	PA Talu	964	0	0,00%	964	100,00%
15	PA Maninjau	209	0	0,00%	209	100,00%
16	PA Tanjung Pati	551	0	0,00%	551	100,00%
17	PA Lubuk Basung	461	0	0,00%	461	100,00%
18	PA Pulau Punjung	538	0	0,00%	538	100,00%
Jumlah		12.765	4	0,03%	12.761	99,97%



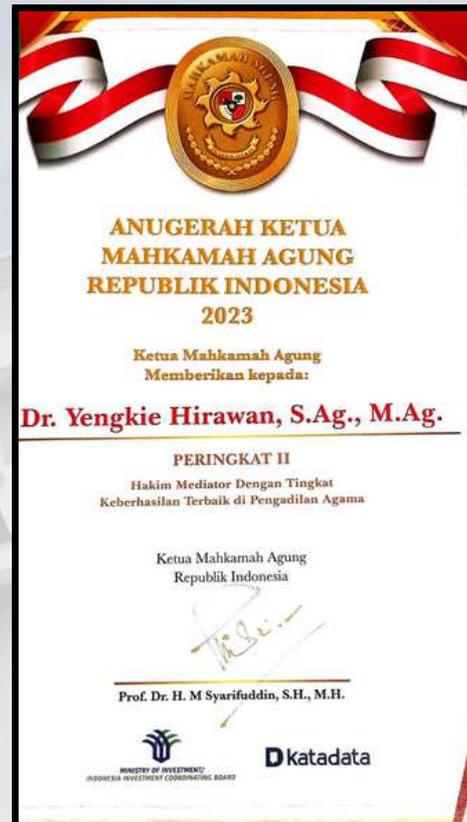
JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI TAHUN 2023

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.

Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan.

Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi Tahun 2023 PA se-Sumatera Barat						
No	Satker	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Mediasi		Tidak Dapat Dilaksanakan	Sisa
			Tidak Berhasil	Berhasil		
1	PA Padang	341	164	159	4	14
2	PA Pariaman	119	65	46	2	6
3	PA Batusangkar	101	3	95	2	1
4	PA Bukittinggi	197	24	162	4	7
5	PA Payakumbuh	138	68	53	1	16
6	PA Sawahlunto	43	26	16	1	0
7	PA Solok	68	8	59	1	0
8	PA Padang Panjang	79	23	45	10	1
9	PA Muara Labuh	19	4	11	3	1
10	PA Sijunjung	40	3	36	0	1
11	PA Koto Baru	87	16	65	6	0
12	PA Painan	71	28	28	14	1
13	PA Lubuk Sikaping	71	31	34	6	0
14	PA Talu	114	39	64	8	3
15	PA Maninjau	33	16	17	0	0
16	PA Tanjung Pati	66	5	61	0	0
17	PA Lubuk Basung	50	38	11	0	1
18	PA Pulau Punjung	42	18	21	1	2
Jumlah		1679	579	983	63	54

Jumlah perkara perdata pada Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang berhasil dimediasi sebanyak 983 perkara atau 58 % dari total 1679 perkara yang dilakukan mediasi. Tahun 2023 PA Bukittinggi berhasil memperoleh penghargaan Peringkat ke II Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi Kategori Pengadilan Agama dengan beban Perkara 1001-2500 pada kegiatan Anugerah Mahkamah Agung RI. Kemudian Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag. berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Hakim Mediator dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Agama.





PROGRAM PRIORITAS

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA-MARI

Menuju Peradilan Agama Modern Berkelas Dunia

2023



I CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) TAHUN 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.

Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POSBAKUM						
No	Satker	Anggaran (Rp)	Realisasi		Jumlah Data Layanan	
			Jumlah (Rp)	(%)		
1	PA Padang	Rp 88.000.000	Rp 88.000.000	100,00%	880	
2	PA Pariaman	Rp 45.600.000	Rp 45.600.000	100,00%	456	
3	PA Batusangkar	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	100,00%	720	
4	PA Bukittinggi	Rp 72.000.000	Rp 71.900.000	99,86%	720	
5	PA Payakumbuh	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00%	300	
6	PA Sawahlunto	Rp 70.000.000	Rp 69.153.000	98,79%	700	
7	PA Solok	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	100,00%	720	
8	PA Padang Panjang	Rp 31.350.000	Rp 31.350.000	100,00%	250	
9	PA Muara Labuh	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00%	300	
10	PA Sijunjung	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	100,00%	949	
11	PA Koto Baru	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	100,00%	800	
12	PA Painan	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	100,00%	400	
13	PA Lubuk Sikaping	Rp 55.600.000	Rp 55.600.000	100,00%	556	
14	PA Talu	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	100,00%	700	
15	PA Maninjau	Rp 46.200.000	Rp 46.200.000	100,00%	462	
16	PA Tanjung Pati	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000	100,00%	1.034	
17	PA Lubuk Basung	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	100,00%	397	
18	PA Pulau Punjung	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	100,00%	360	
Jumlah		Rp 1.090.750.000	Rp 1.089.803.000	99,91%	10.704	

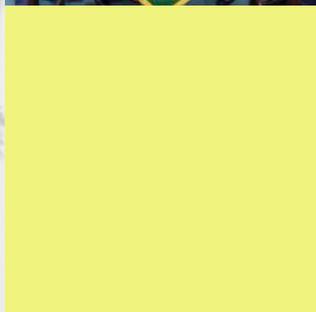
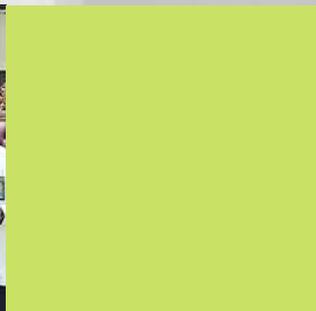
Pelaksanaan pelayanan posbakum diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2023 dengan total pagu anggaran Rp. 1.090.750.000 untuk 18 Pengadilan Agama se- Sumatera Barat telah berhasil direalisasikan 99,91% yaitu sebesar Rp. 1.089.803.000 dengan jumlah orang atau jam layanan 10.704

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 68 B dan 68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang 51 Tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D mengatur hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi Pencari keadilan yang tidak mampu.

Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui kegiatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.



SIDANG KELILING TAHUN 2023

Sidang keliling atau sidang di luar gedung adalah pelayanan sidang yang dilaksanakan di luar kantor Pengadilan baik secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya. Layanan sidang keliling diberikan kepada beberapa Pengadilan Agama melalui anggaran DIPA 04.

Tujuan sidang keliling :

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan justice for the poor).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syariah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.



SIDANG KELILING TAHUN 2023					
No	Satker	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Jumlah Perkara
1	PA Padang	60.000.000	58.647.000	1.353.000	65
2	PA Pariaman	22.500.000	22.500.000	0	59
3	PA Batusangkar	36.000.000	36.000.000	0	66
4	PA Bukittinggi	40.000.000	40.000.000	0	51
5	PA Payakumbuh	-	-	0	0
6	PA Sawahlunto	38.000.000	38.000.000	0	20
7	PA Solok	38.500.000	38.500.000	0	20
8	PA Padang Panjang	31.500.000	31.500.000	0	14
9	PA Muara Labuh	38.000.000	38.000.000	0	49
10	PA Sijunjung	15.000.000	15.000.000	0	22
11	PA Koto Baru	80.000.000	80.000.000	0	290
12	PA Painan	37.500.000	37.500.000	0	43
13	PA Lubuk Sikaping	136.800.000	136.778.571	21.429	325
14	PA Talu	30.000.000	30.000.000	0	147
15	PA Maninjau	42.000.000	42.000.000	0	38
16	PA Tanjung Pati	44.000.000	44.000.000	0	46
17	PA Lubuk Basung	20.300.000	20.300.000	0	47
18	PA Pulau Punjung	28.900.000	28.900.000	0	98
Jumlah		739.000.000	737.625.571	1.374.429	1.400

Pelaksanaan sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2023 dengan total pagu anggaran Rp739.000.000 untuk 17 Pengadilan Agama se Sumatera Barat dari 18 Pengadilan Agama telah berhasil direalisasikan sebesar Rp737.625.571 dengan jumlah perkara 1.400 perkara.

SIDANG TERPADU TAHUN 2023

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015. Satuan Kerja di Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota/Kabupaten dengan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama setempat mengenai Pelayanan Terpadu terhadap masyarakat atau lebih dikenal dengan Sidang Terpadu. Adapun maksud dan tujuan dari sidang terpadu ini adalah untuk memberikan pelayanan secara prima bagi masyarakat yang kurang mampu yang perkawinannya tidak tercatat sehingga sekaligus bisa menerima penetapan dari Pengadilan Agama, menerima akta nikah dan dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran secara cepat sehingga pengurusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan Sidang Terpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2023 berjumlah 297 perkara diterima dan diputus pada 5 satker yang mendapatkan anggaran sidang terpadu yakni PA Padang, PA Sawahlunto, PA Sijunjung, PA Lubuk Sikaping, dan PA Lubuk Basung.

SIDANG TERPADU TAHUN 2023			
No	Satker	Pelaksanaan Sidang Terpadu	
		Diterima	Putus
1	PA Padang	62	62
2	PA Pariaman	0	0
3	PA Batusangkar	0	0
4	PA Bukittinggi	0	0
5	PA Payakumbuh	0	0
6	PA Sawahlunto	8	8
7	PA Solok	0	0
8	PA Padang Panjang	0	0
9	PA Muara Labuh	0	0
10	PA Sijunjung	111	111
11	PA Koto Baru	0	0
12	PA Painan	0	0
13	PA Lubuk Sikaping	86	86
14	PA Talu	0	0
15	PA Maninjau	0	0
16	PA Tanjung Pati	0	0
17	PA Lubuk Basung	30	30
18	PA Pulau Punjung	0	0
Jumlah		297	297



PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) TAHUN 2023

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Adapun petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Kegiatan penyediaan dana untuk pembebasan biaya dalam penyelesaian perkara atau Perkara Prodeo di Pengadilan Agama merupakan kegiatan teknis yang menjadi prioritas sebagai amanah Pasal 56 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) TAHUN 2023						
No	Satker	Pelaksanaan Kegiatan				
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Jumlah Perkara	
1	PA Padang	Rp 52.000.000	Rp 51.899.010	Rp 100.990	130	
2	PA Pariaman	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -	30	
3	PA Batusangkar	Rp 11.060.000	Rp 11.060.000	Rp -	39	
4	PA Bukittinggi	Rp 36.000.000	Rp 31.044.500	Rp 4.955.500	100	
5	PA Payakumbuh	Rp 8.520.000	Rp 8.520.000	Rp -	25	
6	PA Sawahlunto	Rp 7.000.000	Rp 6.115.000	Rp 885.000	20	
7	PA Solok	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	50	
8	PA Padang Panjang	Rp 15.400.000	Rp 14.476.000	Rp 924.000	40	
9	PA Muara Labuh	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -	20	
10	PA Sijunjung	Rp 22.500.000	Rp 22.000.000	Rp 500.000	75	
11	PA Koto Baru	Rp 90.000.000	Rp 84.891.500	Rp 5.108.500	377	
12	PA Painan	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -	40	
13	PA Lubuk Sikaping	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -	331	
14	PA Talu	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	55	
15	PA Maninjau	Rp 4.500.000	Rp 4.060.000	Rp 440.000	17	
16	PA Tanjung Pati	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp -	90	
17	PA Lubuk Basung	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp -	70	
18	PA Pulau Punjung	Rp 6.375.000	Rp 6.320.000	Rp 55.000	17	
Jumlah		Rp 400.855.000	Rp 387.886.010	Rp 12.968.990	1.526	

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2023 menerima anggaran pembebasan biaya perkara dari DIPA 04 sejumlah Rp. 400.855.000. Pengadilan Agama se Sumatera Barat telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 387.886.010 untuk 1.526 perkara.

BAB III

Sumber Daya Manusia





I KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Aparatur peradilan merupakan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan sumber daya manusia diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan. Sumber daya manusia (aparatur peradilan agama) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang terbagi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Teknis yakni terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis yakni terdiri dari sekretaris, kepala bagian, kepala subbagian, fungsional, dan pelaksana.

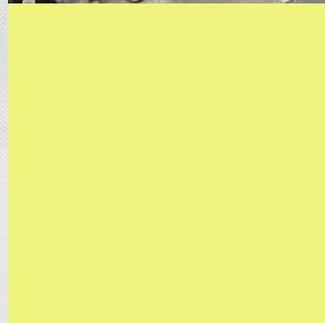
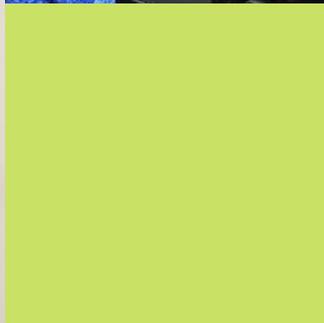
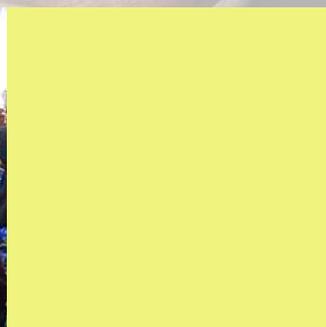


SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.	Ketua
2.	Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.	Wakil Ketua
3.	Drs. Bahrul Amzah, M.H.	Hakim Tinggi
4.	Drs. Najamuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
5.	Drs. H. Abdul Jabar, M.H.	Hakim Tinggi
6.	Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.	Hakim Tinggi
7.	Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H.	Hakim Tinggi
8.	Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.	Hakim Tinggi
9.	Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
10.	Drs. Syafruddin	Panitera
11.	H. Damris, S.H.	Panitera Muda Banding
12.	H. Masdi, S.H.	Panitera Muda Hukum
13.	Ismail, S.H.I., M.A.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
14.	Mukhlis, S.H.	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan
15.	H. Idris Latif, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
16.	Drs. Syaiful Ashar, S.H.	Panitera Pengganti
17.	Bustami, S.H., M.A.	Panitera Pengganti
18.	Dra. Syuryati	Panitera Pengganti
19.	H. M. Yazid. Za, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
20.	Riswan, S.H.	Panitera Pengganti
21.	Amrizal, S.Ag.	Panitera Pengganti
22.	Drs. Hamzah	Panitera Pengganti
23.	Hj. Alifah, S.H.	Panitera Pengganti
24.	Dra. Rusmawita	Panitera Pengganti
25.	Mulyani, S.H.	Panitera Pengganti
26.	Dra. Emilia	Panitera Pengganti
27.	Drs. Nurfadhil	Panitera Pengganti
28.	Drs. Mawardi	Panitera Pengganti
29.	Kasmidar, S.Ag.	Panitera Pengganti
30.	Nora Oktavia, S.H.	Panitera Pengganti
31.	H. Kutung Saraini, S.Ag.	Panitera Pengganti
32.	Enjer Sades, S.H.	Panitera Pengganti
33.	Dra. Sumarni	Panitera Pengganti
34.	Yulfida, S.H.	Panitera Pengganti
35.	Drs. Daryamurni	Panitera Pengganti
36.	Yun Ridhwan, S.H.	Panitera Pengganti
37.	Nelly Oktavia, S.H.	Panitera Pengganti
38.	Elvi Yunita, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran
39.	Rifka Hidayat, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi
40.	Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

41.	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan
42.	Berki Rahmat, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional
43.	Elsa Rusdiana, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
44.	Mursyidah, S.AP.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
45.	Arya Jaya Shentika, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional
46.	Aidil Akbar, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
47.	Masfadhul Karmi, S.A.P.	Operator - Penata Layanan Operasional
48.	Jelsita Novi, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
49.	Riccelia Junifa, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
50.	Yasirli Amri, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
51.	Ade Armawi Paypas, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
52.	Efri Sukma	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran
53.	Fitrya Rafani, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional
54.	Novia Mayasari, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional
55.	Yova Nelindy, A.Md.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
56.	Rinaldi Orlando, A.Md.A.B.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
57.	Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
58.	Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana
59.	Nella Agustri, S.E.	Perencana Ahli Pertama
60.	Nurfadilla, S.I.P.	Arsiparis Ahli Pertama

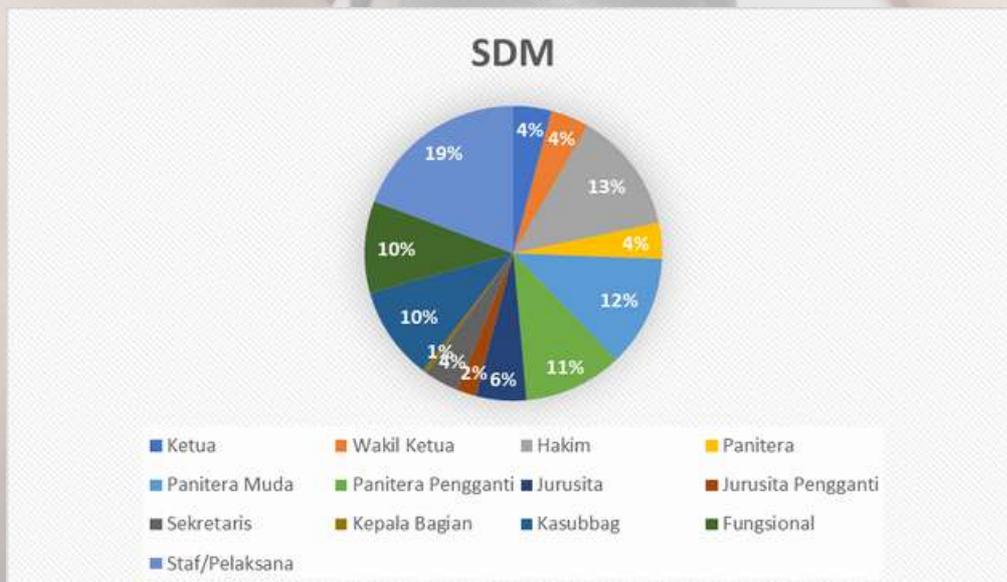


REKAPITULASI SDM TEKNIS DAN NON TEKNIS TAHUN 2023 PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pegawai teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sejumlah 457 orang.

No	Unit Kerja	SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS DAN NON TEKNIS														
		Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Wakil Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Jurusita	Jurusita Pengganti	Sekretaris	Kepala Bagian	Kasubbag	Fungsional	Staf/pelaksana	Total
1	PTA Padang	1	1	7	1	0	2	23	0	0	0	2	4	8	11	60
2	PA Padang Kelas IA	1	1	14	1	0	3	13	3	0	1	0	3	5	7	52
3	PA Pariaman Kelas IB	1	1	4	1	0	3	1	2	1	1	0	3	3	7	28
4	PA Batusangkar Kelas IB	1	1	2	1	0	3	0	2	0	1	0	3	3	3	20
5	PA Bukittinggi Kelas IB	1	1	3	1	0	3	2	4	1	1	0	2	3	6	28
6	PA Payakumbuh Kelas IB	1	1	3	1	0	3	0	1	0	1	0	2	2	4	19
7	PA Tanjung Pati Kelas IB	1	1	3	1	0	3	4	2	1	1	0	3	2	4	26
8	PA Sawahlunto	1	1	1	1	0	3	0	0	0	1	0	3	2	4	17
9	PA Solok	1	1	2	1	0	3	1	2	0	1	0	3	2	5	22
10	PA Padang Panjang	1	1	2	1	0	3	2	1	0	1	0	3	2	4	21
11	PA Muara Labuh	1	1	2	1	0	3	0	0	2	0	0	1	2	2	15
12	PA Sijunjung	1	1	2	1	0	3	0	1	0	1	0	2	1	4	17
13	PA Koto Baru	1	1	3	1	0	3	1	1	0	1	0	1	2	6	21
14	PA Painan	1	1	2	1	0	3	1	0	1	1	0	2	1	4	18
15	PA Lubuk Sikaping	1	1	2	1	0	3	0	1	2	1	0	2	1	2	17
16	PA Talu	1	1	5	1	0	3	1	2	0	1	0	3	2	4	24
17	PA Maninjau	1	1	1	1	0	3	0	2	0	1	0	3	2	4	19
18	PA Lubuk Basung	1	1	1	1	0	3	0	1	1	1	0	2	2	4	18
19	PA Pulau Punjung	1	1	2	0	0	3	0	0	1	1	0	2	1	3	15
JUMLAH		19	19	61	18	0	56	49	25	10	17	2	47	46	88	457

GRAFIK SDM TEKNIS DAN NON TEKNIS TAHUN 2022 PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT



SEBARAN SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN PADA PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	221	48,36%
2	Perempuan	236	51,64%
Jumlah		457	100%

Dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat adalah perempuan yakni sebanyak 236 atau 51,64% dan laki-laki sebanyak 221 atau 48,36%. Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin juga dapat dilihat dari diagram dibawah ini:

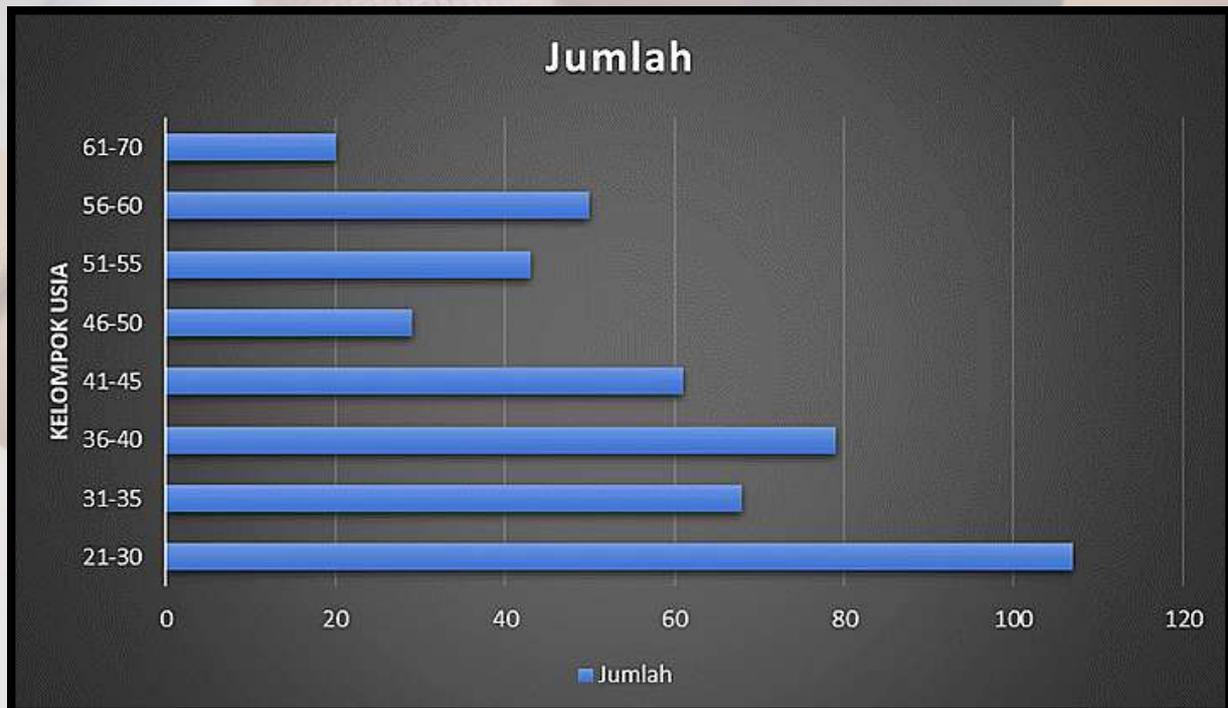


SEBARAN SDM BERDASARKAN USIA PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	21 - 30	107	23,41
2	31 - 35	68	14,88
3	36 - 40	79	17,29
4	41 - 45	61	13,35
5	46 - 50	29	6,35
6	51 - 55	43	9,41
7	56 - 60	50	10,94
8	61 - 70	20	4,38
Jumlah		457	100%

Berdasarkan tabel sebaran SDM diatas, sebagian besar sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dari segi usia berada pada 21 sampai 30 sebanyak 107 orang atau 23,41%.

Sebaran SDM berdasarkan usia juga dapat dilihat dari diagram dibawah adalah sebagai berikut

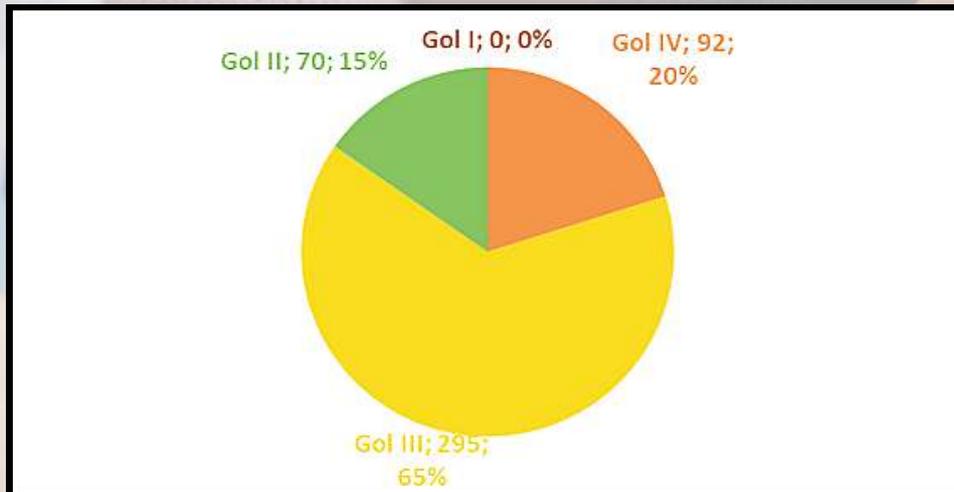


SEBARAN SDM BERDASARKAN GOLONGAN RUANG PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan IV	92	20,13
2	Golongan III	295	64,55
3	Golongan II	70	15,31
4	Golongan I	0	0
Jumlah		457	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dari segi golongan ruang berada pada golongan III sebanyak 295 atau 64,55%.

Sebaran SDM berdasarkan golongan ruang juga dapat dilihat dari diagram dibawah ini



SEBARAN SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	S3	4	0,88
2	S2	100	21,88
3	S1	272	59,52
4	DIII	62	13,57
5	SLTA	19	4,16
Jumlah		457	100%

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber daya manusia dari segi jenjang pendidikan terbanyak adalah strata I yakni sebanyak 272 atau 59,52%. Dan terdapat 4 aparatur peradilan agama yang telah berpendidikan Strata III. Sebaran SDM berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada diagram dibawah ini



I MUTASI

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Promosi dan Mutasi. Berikut data mutasi masuk dan keluar Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat selama tahun 2023 sebagai berikut:

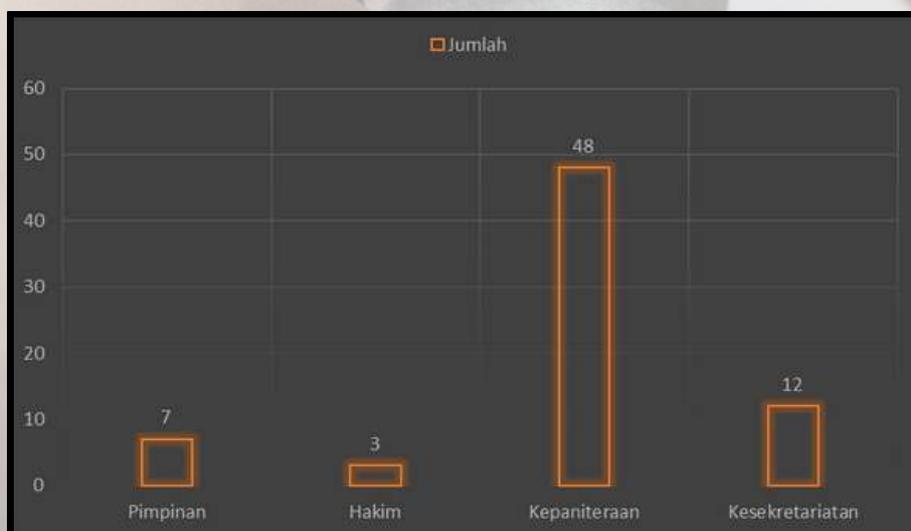
Matriks Data Mutasi Tahun 2023 PA se-Sumatera Barat			
No	Satker	Mutasi Keluar Satker	Mutasi Masuk Satker
1	PTA Padang	3	18
2	PA Padang	1	7
3	PA Pariaman	1	1
4	PA Batusangkar	9	9
5	PA Bukittinggi	6	3
6	PA Payakumbuh	2	1
7	PA Sawahlunto	3	3
8	PA Solok	5	5
9	PA Padang Panjang	3	6
10	PA Muara Labuh	3	4
11	PA Sijunjung	2	2
12	PA Koto Baru	4	5
13	PA Painan	6	4
14	PA Lubuk Sikaping	7	6
15	PA Talu	3	4
16	PA Maninjau	1	0
17	PA Tanjung Pati	2	1
18	PA Lubuk Basung	2	1
19	PA Pulau Punjung	7	8
JUMLAH		67	70

Data mutasi dari dan ke lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang selama tahun 2023 terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) orang yang mutasi keluar dan 70 (tujuh puluh) orang yang mutasi masuk ke lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

I PROMOSI

Matriks Data Promosi Tahun 2023 PA se-Sumatera Barat					
No	Satker	Pimpinan	Hakim	Kepaniteraan	Kesekretariatan
1	PTA Padang	0	0	10	0
2	PA Padang	0	0	2	1
3	PA Pariaman	0	0	8	1
4	PA Batusangkar	1	1	6	2
5	PA Bukittinggi	1	1	3	2
6	PA Payakumbuh	0	1	2	0
7	PA Sawahlunto	0	0	0	0
8	PA Solok	1	0	2	1
9	PA Padang Panjang	1	0	1	0
10	PA Muara Labuh	0	0	2	0
11	PA Sijunjung	0	0	2	0
12	PA Koto Baru	1	0	8	3
13	PA Painan	0	0	2	0
14	PA Lubuk Sikaping	0	0	2	0
15	PA Talu	1	0	3	0
16	PA Maninjau	0	0	1	0
17	PA Tanjung Pati	0	0	1	1
18	PA Lubuk Basung	0	0	1	0
19	PA Pulau Punjung	1	0	2	1
JUMLAH		7	3	48	12

Data promosi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang selama tahun 2023 terdiri dari pimpinan sebanyak 7 orang, hakim 3 orang, Kepaniteraan 48 orang, dan Kesekretariatan 12 orang. Sebaran SDM berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dari diagram dibawah ini.



I Pensiun

Matriks Data Pensiun Tahun 2023 PA se-Sumatera Barat						
No	Satker	Hakim	Kepaniteraan	Keseekretariatan	Ket (BUP/MD)	
					BUP	MD
1	PTA Padang	5	1	0	5	1
2	PA Padang	3	1	0	2	1
3	PA Pariaman	0	0	0	0	0
4	PA Batusangkar	0	0	0	0	0
5	PA Bukittinggi	1	0	0	1	0
6	PA Payakumbuh	0	1	0	1	0
7	PA Sawahlunto	0	1	0	1	0
8	PA Solok	0	0	0	0	0
9	PA Padang Panjang	0	0	2	2	0
10	PA Muara Labuh	0	0	2	2	0
11	PA Sijunjung	0	0	0	0	0
12	PA Koto Baru	0	0	0	0	0
13	PA Painan	0	0	0	0	0
14	PA Lubuk Sikaping	0	0	0	0	0
15	PA Talu	0	0	0	0	0
16	PA Maninjau	0	0	0	0	0
17	PA Tanjung Pati	0	0	0	0	0
18	PA Lubuk Basung	0	1	0	1	0
19	PA Pulau Punjung	0	1	0	0	1
JUMLAH		4	5	4	10	2

Data pensiun di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang selama tahun 2023 terdiri dari hakim sebanyak 9 orang, Kepaniteraan 6 orang, dan Keseekretariatan 4 orang.



I PENDIDIKAN & PELATIHAN SDM

DATA PESERTA DIKLAT TAHUN 2023 WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

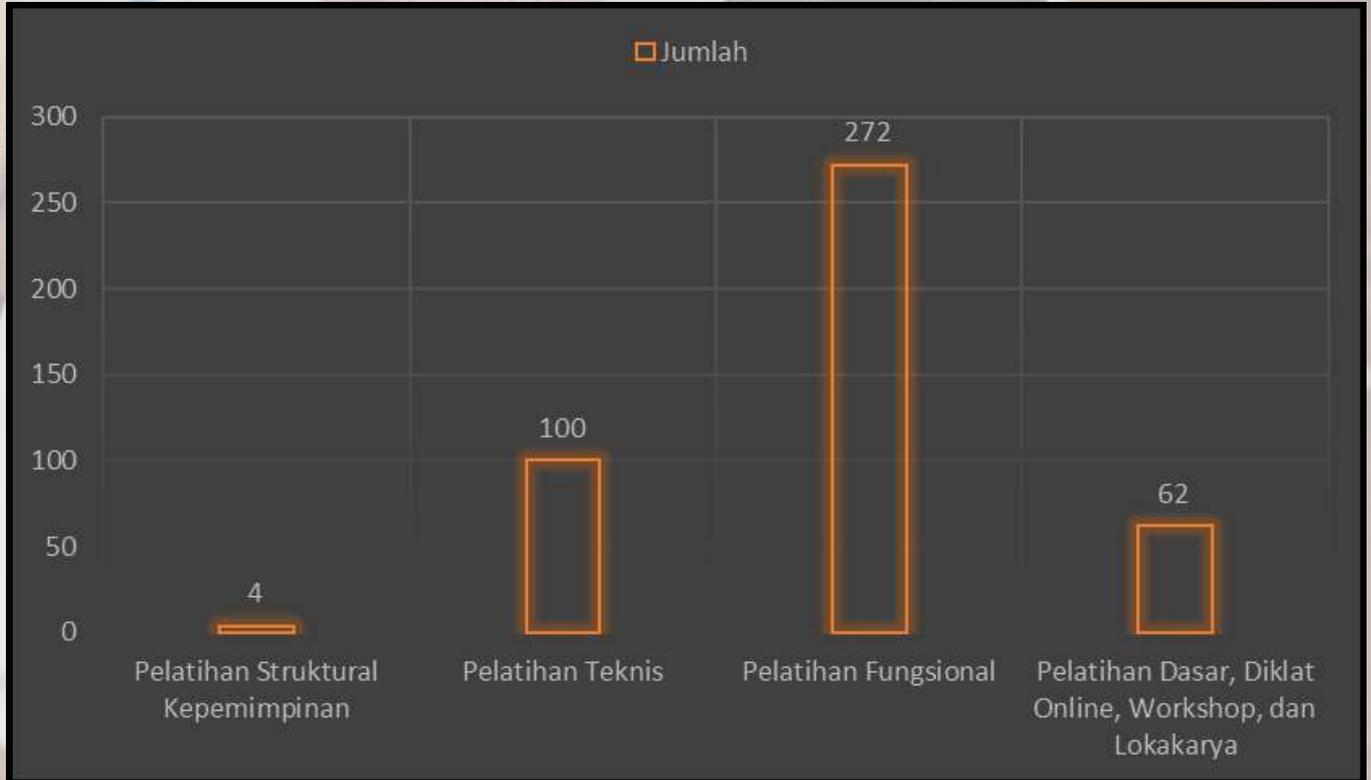
Rekap Data Peserta Diklat Tahun 2023 PA se-Sumatera Barat					
No	Satker	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Dasar, Diklat Online, Workshop/Lokakarya
1	PTA Padang	0	14	4	41
2	PA Padang	4	40	0	44
3	PA Pariaman	0	10	0	5
4	PA Batusangkar	0	10	0	8
5	PA Bukittinggi	0	16	2	17
6	PA Payakumbuh	1	5	1	7
7	PA Sawahlunto	0	3	0	4
8	PA Solok	0	20	0	20
9	PA Padang Panjang	0	11	0	21
10	PA Muara Labuh	1	13	1	2
11	PA Sijunjung	1	8	0	2
12	PA Koto Baru	0	13	0	1
13	PA Painan	0	19	0	2
14	PA Lubuk Sikaping	2	7	0	10
15	PA Talu	0	24	6	23
16	PA Maninjau	0	19	0	19
17	PA Tanjung Pati	1	5	0	15
18	PA Lubuk Basung	0	10	2	18
19	PA Pulau Punjung	1	5	1	6
JUMLAH		11	238	13	224

Rekap data peserta diklat tahun 2023 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang terdiri atas pelatihan struktural kepemimpinan sebanyak 11 orang, pelatihan teknis 252 orang, pelatihan fungsional 17 orang, dan pelatihan dasar, diklat online, workshop sebanyak 265 orang.

No	Jenis Kompetensi	Jumlah (orang)
1	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	4
2	Pelatihan Teknis	100
3	Pelatihan Fungsional	272
4	Pelatihan Dasar, Diklat Online, Workshop, Lokakarya	62
Jumlah		457

I PENDIDIKAN & PELATIHAN SDM

DATA PESERTA DIKLAT TAHUN 2023 WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi





PENGELOLAAN KEUANGAN DI WILAYAH PTA PADANG

99.88% Penyerapan Anggaran DIPA 01

Program Dukungan Manajemen

Rp87,954,259,436 Realisasi Belanja tahun 2023
dari total pagu keseluruhan Rp88,932,137,000

99.92% Penyerapan Anggaran DIPA 04

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp2.504.229.781 Realisasi Belanja tahun 2023
dari total pagu keseluruhan Rp2.533.455.000

Tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.88.932.137.000- (Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp87.954.259.436 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dari Program Dukungan Manajemen.

Sedangkan untuk DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.533.455.000 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp2.504.229.781 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

I DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.88.932.137.000- (Delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh rupiah) dari program dukungan manajemen dengan 2 (dua kegiatan) yakni :

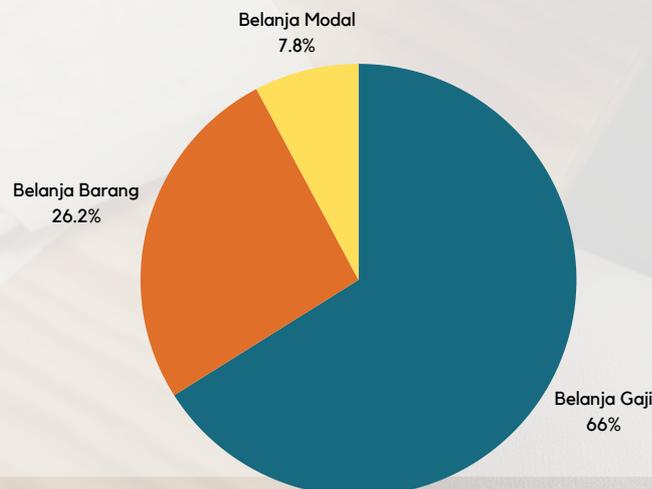
- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU 2021 (Rp)	PAGU 2022 (Rp)	PAGU 2023 (Rp)
Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	83.640.462.000	90.004.398.000	82.031.795.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	20.088.294.000	8.283.000.000	6.900.342.000
TOTAL		103.728.756.000	92.610.398.000	88.932.137.000

Belanja Pada Program Dukungan Manajemen terdiri dari:

- Belanja Gaji sebesar Rp. 58.730.337.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Belanja Barang sebesar Rp. 23.301.458.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.
- Belanja Modal sebesar Rp 6.900.342.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.

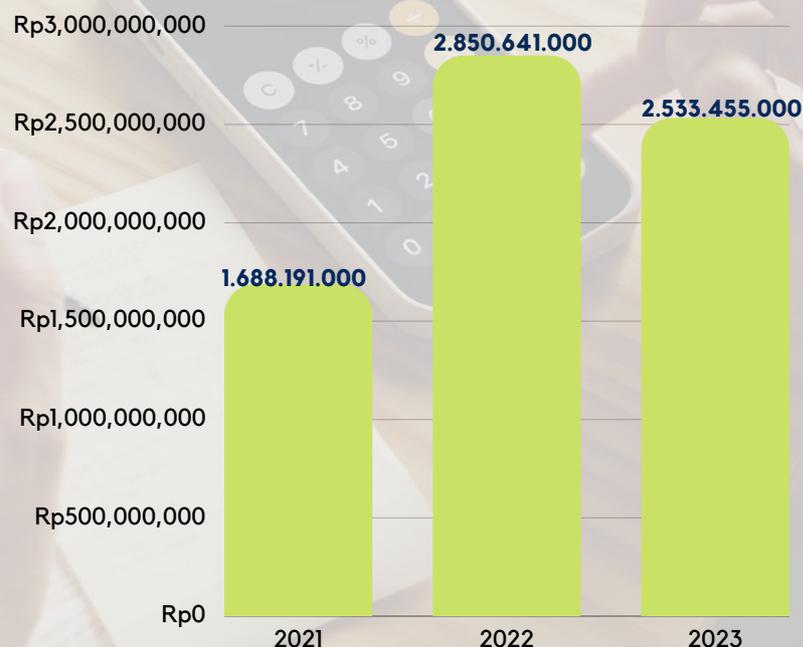


I DIPA 04 BADAN PERADILAN AGAMA

Tahun 2023, DIPA 04 Ditjen Badilag Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.533.455.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Alokasi Anggaran DIPA 04 dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM	PAGU 2021 (Rp)	PAGU 2022 (Rp)	PAGU 2023 (Rp)
Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.688.191.000	2.850.641.000	2.533.455.000

Alokasi anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami naik turun. pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 69% atau sebesar Rp. 1.162.450.000. sedangkan tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp317.186.000 atau sebesar -12.4%. Rincian anggarannya terdiri atas belanja barang yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan yaitu pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan pos layanan hukum untuk para pencari keadilan. Pagu anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari tahun 2021 hingga tahun 2023 juga dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



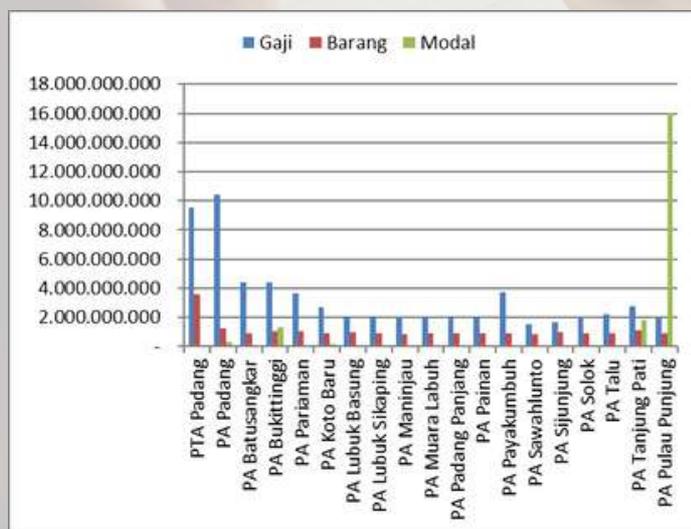
ALOKASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2023

Rekap Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023 Wilayah PTA Padang						
No	Satker	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi				DIPA 04
		Gaji	Barang	Modal	Jumlah	Barang
1	PTA Padang	10.216.526.000	3.427.652.000	198.000.000	13.842.178.000	208.000.000
2	PA Padang	9.681.617.000	1.172.153.000	89.000.000	10.942.770.000	238.800.000
3	PA Pariaman	3.405.882.000	1.130.414.000	385.431.000	4.921.727.000	80.100.000
4	PA Batusangkar	2.462.081.000	1.150.463.000	181.959.000	3.794.503.000	119.060.000
5	PA Bukittinggi	3.384.688.000	1.715.734.000	114.000.000	5.214.422.000	148.000.000
6	PA Payakumbuh	2.695.189.000	1.100.068.000	460.431.000	4.255.688.000	38.520.000
7	PA Sawahlunto	1.804.437.000	910.734.000	0	2.715.171.000	128.800.000
8	PA Solok	2.055.035.000	1.011.792.000	67.000.000	3.133.827.000	125.500.000
9	PA Padang Panjang	1.861.720.000	1.137.650.000	199.750.000	3.199.120.000	78.250.000
10	PA Muara Labuh	1.824.634.000	1.080.385.000	179.000.000	3.084.019.000	74.000.000
11	PA Sijunjung	1.921.656.000	1.126.549.000	200.000.000	3.248.205.000	129.100.000
12	PA Koto Baru	2.325.136.000	1.025.117.000	0	3.350.253.000	250.000.000
13	PA Painan	2.031.053.000	1.041.276.000	790.340.000	3.862.669.000	89.500.000
14	PA Lubuk Sikaping	1.871.107.000	1.031.005.000	0	2.902.112.000	256.050.000
15	PA Talu	2.572.670.000	973.269.000	10.000.000	3.555.939.000	115.000.000
16	PA Maninjau	1.984.847.000	972.161.000	0	2.957.008.000	92.700.000
17	PA Tanjung Pati	2.784.524.000	1.184.129.000	364.700.000	4.333.353.000	179.000.000
18	PA Lubuk Basung	2.052.510.000	1.059.836.000	180.000.000	3.292.346.000	111.800.000
19	PA Pulau Punjung	1.795.025.000	1.051.071.000	3.480.731.000	6.326.827.000	71.275.000
JUMLAH		58.730.337.000	23.301.458.000	6.900.342.000	88.932.137.000	2.533.455.000

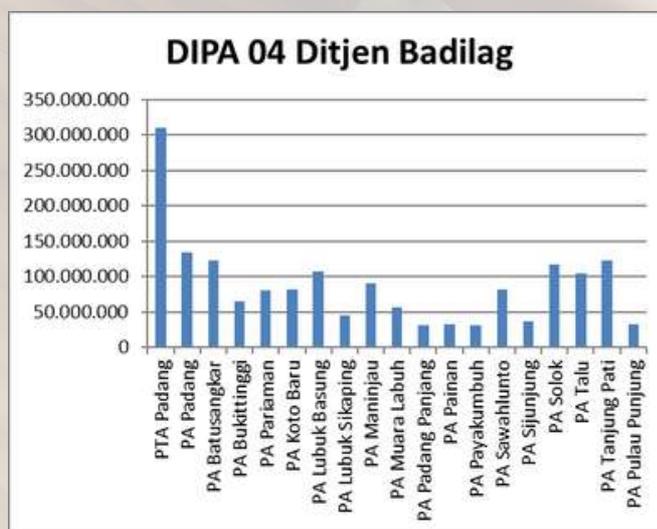
Sumber Aplikasi e-Bima Tahun Anggaran 2023

PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN

DIPA 01 BUA



DIPA 04 BADILAG



I REALISASI ANGGARAN BELANJA WILAYAH PTA PADANG TAHUN 2023

REALISASI BELANJA PEGAWAI

Alokasi anggaran belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2023 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh pagu sebesar Rp58.730.337.000 dengan realisasi sebesar Rp57.862.997.272 yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara baik berupa gaji pokok, uang makan dan tunjangan lainnya.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Wilayah PTA Padang Tahun 2023					
No	Satker	Pagu	Realisasi	(%)	Sisa
1	PTA Padang	10.216.526.000	10.204.315.810	99,88	12.210.190
2	PA Padang	9.681.617.000	9.672.537.455	99,91	9.079.545
3	PA Pariaman	3.405.882.000	3.399.240.652	99,81	6.641.348
4	PA Batusangkar	2.462.081.000	2.445.765.632	99,34	16.315.368
5	PA Bukittinggi	3.384.688.000	3.383.745.135	99,97	942.865
6	PA Payakumbuh	2.695.189.000	2.689.870.516	99,80	5.318.484
7	PA Sawahlunto	1.804.437.000	1.711.058.198	94,83	93.378.802
8	PA Solok	2.055.035.000	2.005.363.698	97,58	49.671.302
9	PA Padang Panjang	1.861.720.000	1.809.437.226	97,19	52.282.774
10	PA Muara Labuh	1.824.634.000	1.819.715.383	99,73	4.918.617
11	PA Sijunjung	1.921.656.000	1.920.805.036	99,96	850.964
12	PA Koto Baru	2.325.136.000	2.281.644.189	98,13	43.491.811
13	PA Painan	2.031.053.000	1.849.841.360	91,08	181.211.640
14	PA Lubuk Sikaping	1.871.107.000	1.724.116.394	92,14	146.990.606
15	PA Talu	2.572.670.000	2.571.642.565	99,96	1.027.435
16	PA Maninjau	1.984.847.000	1.948.092.690	98,15	36.754.310
17	PA Tanjung Pati	2.784.524.000	2.783.511.951	99,96	1.012.049
18	PA Lubuk Basung	2.052.510.000	1.951.254.777	95,07	101.255.223
19	PA Pulau Punjung	1.795.025.000	1.691.038.605	94,21	103.986.395
JUMLAH		58.730.337.000	57.862.997.272		867.339.728

Sumber Aplikasi e-Bima Tahun Anggaran 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi Belanja Pegawai di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar 97.72% dengan realisasi belanja pegawai tertinggi oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sebesar 99.97% dan yang terendah pada Pengadilan Agama Painan sebesar 91.08%.

REALISASI BELANJA BARANG

Belanja Barang terdiri dari belanja barang operasional dan belanja barang non operasional yang dilaksanakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Persentase realisasi belanja barang tertinggi ada pada Pengadilan Agama Padang yakni sebesar 99.98% dan yang terendah pada Pengadilan Agama Talu sebesar 95.41%.

Realisasi Anggaran Belanja Barang Wilayah PTA Padang Tahun 2023					
No	Satker	Pagu	Realisasi	(%)	Sisa
1	PTA Padang	3.427.652.000	3.423.030.068	99,87	4.621.932
2	PA Padang	1.172.153.000	1.171.880.417	99,98	272.583
3	PA Pariaman	1.130.414.000	1.128.946.545	99,87	1.467.455
4	PA Batusangkar	1.150.463.000	1.149.824.881	99,94	638.119
5	PA Bukittinggi	1.715.734.000	1.713.865.045	99,89	1.868.955
6	PA Payakumbuh	1.100.068.000	1.099.353.833	99,94	714.167
7	PA Sawahlunto	910.734.000	906.912.201	99,58	3.821.799
8	PA Solok	1.011.792.000	1.007.831.248	99,61	3.960.752
9	PA Padang Panjang	1.137.650.000	1.116.767.754	98,16	20.882.246
10	PA Muara Labuh	1.080.385.000	1.062.114.778	98,31	18.270.222
11	PA Sijunjung	1.126.549.000	1.124.433.482	99,81	2.115.518
12	PA Koto Baru	1.025.117.000	1.021.469.230	99,64	3.647.770
13	PA Painan	1.041.276.000	1.038.424.955	99,73	2.851.045
14	PA Lubuk Sikaping	1.031.005.000	1.018.263.038	98,76	12.741.962
15	PA Talu	973.269.000	928.597.575	95,41	44.671.425
16	PA Maninjau	972.161.000	970.789.429	99,86	1.371.571
17	PA Tanjung Pati	1.184.129.000	1.182.665.840	99,88	1.463.160
18	PA Lubuk Basung	1.059.836.000	1.059.502.288	99,97	333.712
19	PA Pulau Punjung	1.051.071.000	1.050.387.157	99,93	683.843
JUMLAH		23.301.458.000	23.175.059.764		126.398.236

Sumber Aplikasi e-Bima Tahun Anggaran 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi Belanja Barang di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar 99.37% dengan realisasi belanja barang tertinggi oleh Pengadilan Agama Padang sebesar 99.98% dan yang terendah pada Pengadilan Agama Talu sebesar 95.41%.

REALISASI BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan alokasi belanja yang digunakan untuk menambah nilai aset berupa pengadaan gedung bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan mesin. Berikut rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2023 :

Realisasi Anggaran Belanja Modal Wilayah PTA Padang Tahun 2023					
No	Satker	Pagu	Realisasi	(%)	Sisa
1	PTA Padang	198.000.000	197.884.450	99,94	115.550
2	PA Padang	89.000.000	88.683.550	99,64	316.450
3	PA Pariaman	385.431.000	384.724.440	99,82	706.560
4	PA Batusangkar	181.959.000	180.114.401	98,99	1.844.599
5	PA Bukittinggi	114.000.000	112.150.000	98,38	1.850.000
6	PA Payakumbuh	460.431.000	460.430.409	100,00	591
7	PA Sawahlunto	0	0	0,00	0
8	PA Solok	67.000.000	67.000.000	100,00	0
9	PA Padang Panjang	199.750.000	196.606.868	98,43	3.143.132
10	PA Muara Labuh	179.000.000	178.336.160	99,63	663.840
11	PA Sijunjung	200.000.000	198.912.000	99,46	1.088.000
12	PA Koto Baru	0	0	0,00	0
13	PA Painan	790.340.000	788.230.478	99,73	2.109.522
14	PA Lubuk Sikaping	0	0	0,00	0
15	PA Talu	10.000.000	10.000.000	100,00	0
16	PA Maninjau	0	0	0,00	0
17	PA Tanjung Pati	364.700.000	364.700.000	100,00	0
18	PA Lubuk Basung	180.000.000	178.094.885	98,94	1.905.115
19	PA Pulau Punjung	3.480.731.000	3.470.169.659	99,70	10.561.341
JUMLAH		6.900.342.000	6.876.037.300	1.493	24.304.700

Sumber Aplikasi e-Bima Tahun Anggaran 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa satuan kerja yang Persentase Realisasi Belanja Modalnya mencapai 100% yakni Pengadilan Agama Payakumbuh, Pengadilan Agama Solok, Pengadilan Agama Talu, dan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Terdapat beberapa satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang tidak mendapatkan belanja modal, diantaranya Pengadilan Agama Sawahlunto, Pengadilan Agama Koto Baru, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan Pengadilan Agama Maninjau.

I REALISASI ANGGARAN BELANJA WILAYAH PTA PADANG TAHUN 2023

REALISASI BELANJA BARANG DIPA 04

Tahun Anggaran 2023 satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya mengelola anggaran dari Rupiah Murni (APBN) dan tidak terdapat anggaran yang bersumber dari PNBPNP seperti pada tahun sebelumnya. Rekapitulasi anggaran belanja barang untuk DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) Tahun Anggaran 2023 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang (DIPA 04) Wilayah PTA Padang Tahun 2023					
No	Satker	Pagu	Realisasi	(%)	Sisa
1	PTA Padang	208.000.000	207.839.500	99,92	160.500
2	PA Padang	238.800.000	236.611.710	99,08	2.188.290
3	PA Pariaman	80.100.000	80.100.000	100,00	0
4	PA Batusangkar	119.060.000	119.060.000	100,00	0
5	PA Bukittinggi	148.000.000	142.944.500	96,58	5.055.500
6	PA Payakumbuh	38.520.000	38.520.000	100,00	0
7	PA Sawahlunto	128.800.000	115.298.000	89,52	13.502.000
8	PA Solok	125.500.000	125.500.000	100,00	0
9	PA Padang Panjang	78.250.000	77.326.000	98,82	924.000
10	PA Muara Labuh	74.000.000	73.970.000	99,96	30.000
11	PA Sijunjung	129.100.000	128.600.000	99,61	500.000
12	PA Koto Baru	250.000.000	244.891.500	97,96	5.108.500
13	PA Painan	89.500.000	89.460.000	99,96	40.000
14	PA Lubuk Sikaping	256.050.000	254.828.571	99,52	1.221.429
15	PA Talu	115.000.000	115.000.000	100,00	0
16	PA Maninjau	92.700.000	92.260.000	99,53	440.000
17	PA Tanjung Pati	179.000.000	179.000.000	100,00	0
18	PA Lubuk Basung	111.800.000	111.800.000	100,00	0
19	PA Pulau Punjung	71.275.000	71.220.000	99,92	55.000
JUMLAH		2.533.455.000	2.504.229.781	1.880	29.225.219

Sumber Aplikasi e-Bima Tahun Anggaran 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa satuan kerja yang Persentase Realisasi Belanja Barang DIPA 04 nya mencapai 100% yakni Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan Agama Payakumbuh, Pengadilan Agama Maninjau, Pengadilan Agama Payakumbuh, dan Pengadilan Agama Solok, Pengadilan Agama Talu, Pengadilan Agama Tanjung Pati, dan Pengadilan Agama Lubuk Basung sedangkan yang terendah pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

I REALISASI PNBP PTA PADANG TAHUN 2023

REALISASI PNBP DIPA 01 BUA

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA Badan Urusan Administrasi (01) tahun 2023 pada satker se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar Rp.111.575.400 (Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). Realisasi PNBP DIPA 01 diperoleh dari pengelolaan BMN berupa sewa rumah dinas dan dari hasil Lelang BMN dalam proses penghapusan karena Rusak Berat. Berikut tabel estimasi dan realisasi PNBP untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi PNBP DIPA 01 Wilayah PTA Padang Tahun 2023				
No	Satker	Estimasi	Realisasi	(%)
1	PTA Padang	7.200.000	30.566.499	425
2	PA Padang	76.000	0	-
3	PA Pariaman	0	441.041	-
4	PA Batusangkar	0	0	-
5	PA Bukittinggi	245.000	928.298	379
6	PA Payakumbuh	0	0	-
7	PA Sawahlunto	0	4.041.429	-
8	PA Solok	735.000	1.260.000	171
9	PA Padang Panjang	1.592.000	17.618.168	1.107
10	PA Muara Labuh	2.216.000	2.215.200	100
11	PA Sijunjung	3.284.000	1.814.080	55
12	PA Koto Baru	0	0	-
13	PA Painan	706.000	2.808.000	398
14	PA Lubuk Sikaping	125.000	462.000	370
15	PA Talu	179.000	298.980	167
16	PA Maninjau	0	47.361.677	-
17	PA Tanjung Pati	0	0	-
18	PA Lubuk Basung	1.688.000	1.687.956	100
19	PA Pulau Punjung	0	72.072	-
JUMLAH		18.046.000	111.575.400	618,28

Sumber: Sakti Laporan Realisasi Anggaran TA 2023

Berdasarkan tabel diatas, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan PNBP tertinggi yakni Pengadilan Agama Maninjau sebesar Rp47.361.677. Terdapat 5 satker yang tidak menerima PNPB DIPA 01 yakni Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan Agama Payakumbuh, Pengadilan Agama Kotobaru, dan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Secara keseluruhan, realisasi PNBP Tahun 2023 jauh melampaui estimasi yang ditetapkan.

I REALISASI PNBP PTA PADANG TAHUN 2023

REALISASI PNBP DIPA 04 BADILAG

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04) tahun 2023 sebesar Rp1.191.851.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp942.270.500 atau sebesar 79.06%. Berikut tabel estimasi dan realisasi PNBP untuk DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Realisasi PNBP DIPA 04 Wilayah PTA Padang Tahun 2023				
No	Satker	Estimasi	Realisasi	(%)
1	PTA Padang	550.000	740.000	134,55
2	PA Padang	227.004.000	156.833.000	69,09
3	PA Pariaman	130.579.000	99.092.000	75,89
4	PA Batusangkar	78.730.000	55.452.000	70,43
5	PA Bukittinggi	73.647.000	67.726.500	91,96
6	PA Payakumbuh	54.633.000	65.460.500	119,82
7	PA Sawahlunto	18.467.000	17.522.500	94,89
8	PA Solok	46.128.000	32.120.500	69,63
9	PA Padang Panjang	30.766.000	29.938.500	97,31
10	PA Muara Labuh	33.523.000	28.189.500	84,09
11	PA Sijunjung	34.415.000	29.178.500	84,78
12	PA Koto Baru	68.182.000	42.656.000	62,56
13	PA Painan	75.497.000	75.066.000	99,43
14	PA Lubuk Sikaping	40.788.000	36.603.500	89,74
15	PA Talu	91.344.000	77.159.000	84,47
16	PA Maninjau	21.747.000	15.560.000	71,55
17	PA Tanjung Pati	87.003.000	40.826.000	46,92
18	PA Lubuk Basung	49.815.000	32.934.000	66,11
19	PA Pulau Punjung	29.033.000	39.212.500	135,06
JUMLAH		1.191.851.000	942.270.500	79,06

Sumber: Sakti Laporan Realisasi Anggaran TA 2023

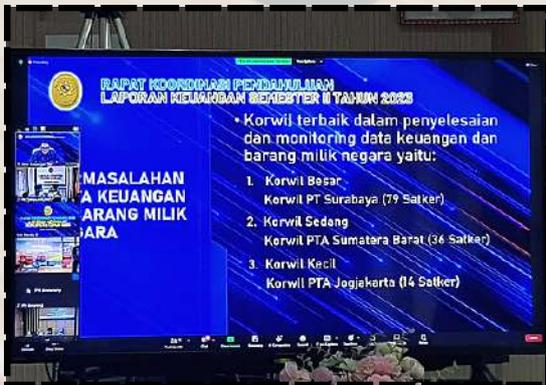
Berdasarkan tabel diatas, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA Badilag (04) dengan PNBP tertinggi yakni Pengadilan Agama Padang sebesar Rp156.833.000 dan PNBP terendah yakni Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar Rp 740.000. Secara keseluruhan PNBP DIPA 04 Wilayah PTA Padang tidak sesuai dengan estimasi hanya tercapai 79,06 % dari target yang dibuat. Tidak tercapainya target estimasi PNBP pada DIPA 04 ini disebabkan oleh adanya kebijakan berperkara secara e-court serta penerapan kerjasama pengiriman Dokumen Surat Tercatat dengan PT Pos Indonesia dengan biaya berperkara yang lebih murah.

PRESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

PRESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA SE-SUMBAR					
NO	SATKER	PENGHARGAAN		INSTANSI PEMBERI	KETERANGAN (PERINGKAT)
		KATEGORI	JENIS		
1	PTA Padang	Satuan Kerja Non Kementerian Keuangan (Konversi 100%) TA 2022 dengan nilai 99.17		KPPN Padang	Terbaik Kedua
		Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPPA) Wilayah Tahun 2022		DJPb Provinsi Sumatera Barat	Peringkat 1
		Capaian IKPA Terbaik Semester I Tahun 2023	Pagu Sedang	KPPN Padang	Peringkat 4
		Korwil Terbaik dalam penyelesaian dan monitoring data keuangan dan barang milik negara	Korwil Sedang	Biro Keuangan MA RI	Terbaik Pertama
2	PA PADANG	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2023	Pagu Sedang (Antara 10 Milliar Rupiah Sampai Dengan 100 Milliar)	DJPB	Peringkat 3
		Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2023	Pagu Kecil (Kurang dari 10 Milliar Rupiah)	KPPN Padang	Peringkat 4
3	PA PARIAMAN	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun 2023	Pagu Kecil (Kurang dari 10 Milliar Rupiah)	KPPN Padang	Peringkat 3
4	PA PAYAKUMBUH	Satker dengan LK Triwulan III TA 2023 Terbaik (DIPA 04)	DIPA BADILAG (04)	PTA Padang	Peringkat 3
5	PA PADANG PANJANG	Satker dengan Nilai Deviasi Halaman III DIPA Periode Semester I 2023	Pagu Kecil (Kurang dari 10 Milliar Rupiah)	KPPN Bukittinggi	Sempurna
6	PA LUBUK BASUNG	LK Triwulan III TA 2023	DIPA BADILAG (04)	PTA Padang	Peringkat I



PRESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT





PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sebanyak 19 (sembilan belas) satuan kerja telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Koordinator Wilayah 4 (empat) lingkungan peradilan di Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berfungsi mengkoordinir dan mengawasi laporan.

Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah terintegrasi ke dalam aplikasi Sakti Modul. Sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara.

Salah satunya untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik per semester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

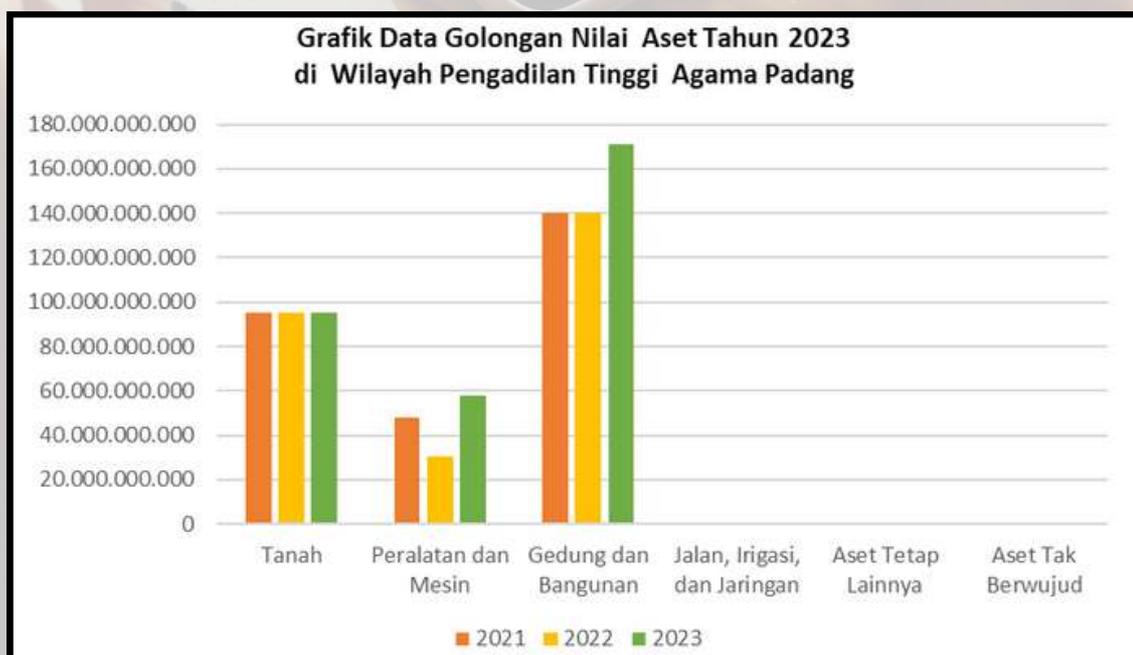


I DATA GOLONGAN DAN NILAI ASET TAHUN 2023

Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun golongan dan nilai Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan yang berada di wilayah hukumnya pada tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Data Golongan dan Nilai Aset Tahun 2023 Wilayah PTA Padang				
No	Satker	Nilai (Rp)		
		2021	2022	2023
1	Tanah	94.951.712.212	94.951.712.212	94.951.712.212
2	Peralatan dan Mesin	48.073.812.442	30.358.945.833	57.788.453.786
3	Gedung dan Bangunan	139.948.226.536	139.948.226.536	170.932.932.832
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	337.876.470	337.876.470	19.320.000
5	Aset Tetap Lainnya	748.465.117	686.004.007	749.992.951
6	Aset Tak Berwujud	58.636.440	58.636.440	26.888.220
JUMLAH		283.370.264.100	265.655.397.491	324.469.300.001

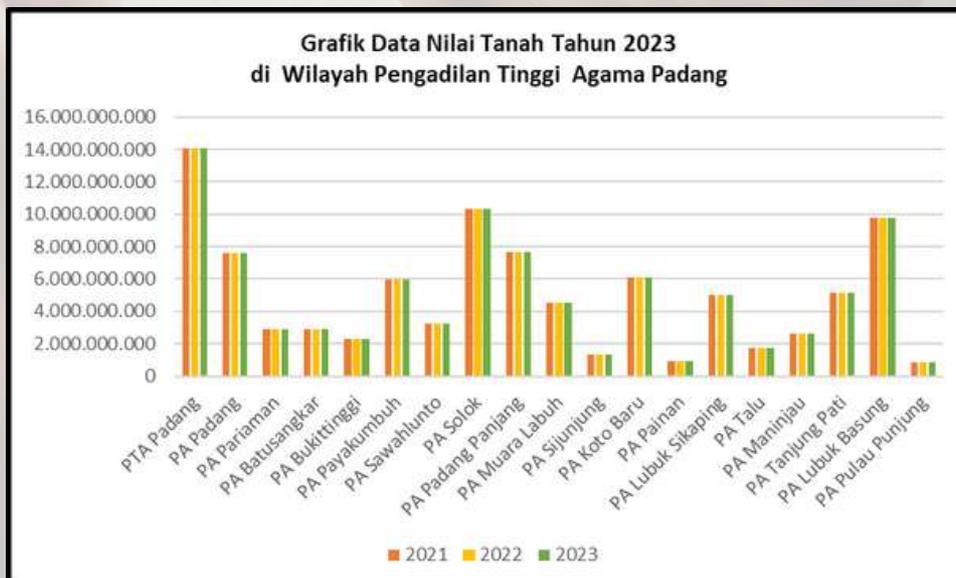
GRAFIK DATA GOLONGAN DAN NILAI ASET TAHUN 2023 WILAYAH PTA PADANG



TANAH

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan publik. Nilai tanah Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 sebagai berikut:

Rekap Nilai Aset Tanah Tahun 2023 Wilayah PTA Padang				
No	Satker	Nilai Aset Tanah (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PTA Padang	14.038.111.000	14.038.111.000	14.038.111.000
2	PA Padang	7.574.063.000	7.574.063.000	7.574.063.000
3	PA Pariaman	2.877.958.662	2.877.958.662	2.877.958.662
4	PA Batusangkar	2.911.762.000	2.911.762.000	2.911.762.000
5	PA Bukittinggi	2.291.822.300	2.291.822.300	2.291.822.300
6	PA Payakumbuh	5.984.628.000	5.984.628.000	5.984.628.000
7	PA Sawahlunto	3.206.396.250	3.206.396.250	3.206.396.250
8	PA Solok	10.339.268.000	10.339.268.000	10.339.268.000
9	PA Padang Panjang	7.652.500.000	7.652.500.000	7.652.500.000
10	PA Muara Labuh	4.515.631.000	4.515.631.000	4.515.631.000
11	PA Sijunjung	1.340.863.000	1.340.863.000	1.340.863.000
12	PA Koto Baru	6.105.315.000	6.105.315.000	6.105.315.000
13	PA Painan	954.182.000	954.182.000	954.182.000
14	PA Lubuk Sikaping	5.010.105.000	5.010.105.000	5.010.105.000
15	PA Talu	1.711.651.000	1.711.651.000	1.711.651.000
16	PA Maninjau	2.637.000.000	2.637.000.000	2.637.000.000
17	PA Tanjung Pati	5.153.603.000	5.153.603.000	5.153.603.000
18	PA Lubuk Basung	9.809.353.000	9.809.353.000	9.809.353.000
19	PA Pulau Punjung	837.500.000	837.500.000	837.500.000
TOTAL		94.951.712.212	94.951.712.212	94.951.712.212



PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat angkut, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

Rekap Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Wilayah PTA Padang				
No	Satker	Nilai Aset Peralatan dan Mesin (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PTA Padang	4.915.482.756	2.622.129.218	5.440.947.906
2	PA Padang	3.327.299.749	3.327.299.749	4.092.617.576
3	PA Pariaman	2.173.256.323	3.115.782.151	3.381.343.113
4	PA Batusangkar	3.115.782.151	2.603.536.213	3.478.196.901
5	PA Bukittinggi	2.603.536.213	2.174.548.823	3.055.100.963
6	PA Payakumbuh	2.350.216.641	2.269.217.500	3.142.012.391
7	PA Sawahlunto	2.207.969.335	2.349.555.230	2.580.087.145
8	PA Solok	2.583.273.937	2.700.057.992	3.065.423.739
9	PA Padang Panjang	1.841.179.553	2.622	1.944.132.103
10	PA Muara Labuh	1.800.270.548	1.620.098.548	2.411.744.958
11	PA Sijunjung	2.195.894.889	1.841.179.553	3.054.391.639
12	PA Koto Baru	2.269.217.500	2.201.855.007	2.726.052.250
13	PA Painan	2.201.855.007	2.350.216.641	2.031.872.674
14	PA Lubuk Sikaping	2.700.057.992	2.439.562.495	2.646.530.242
15	PA Talu	2.111.916.420	2.159.894.889	2.521.835.170
16	PA Maninjau	2.622.129.218	2.583.273.937	2.935.273.968
17	PA Tanjung Pati	2.842.504.378	2.111.916.420	3.394.061.324
18	PA Lubuk Basung	2.349.555.230	2.842.504.378	2.700.849.980
19	PA Pulau Punjung	1.862.414.602	1.659.121.600	3.185.979.744
TOTAL		48.073.812.442	42.971.752.966	57.788.453.786



GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup antara lain gedung kantor dan bangunan rumah negara. Nilai gedung dan bangunan TA. 2021, 2022 dan 2023 dapat dirinci sebagaimana berikut:

Rekap Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Wilayah PTA Padang				
No	Satker	Nilai Gedung dan Bangunan (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PTA Padang	10.034.365.500	10.034.365.500	10.232.249.950
2	PA Padang	11.087.854.809	11.087.854.809	11.087.854.809
3	PA Pariaman	16.734.980.766	16.734.980.766	16.734.980.766
4	PA Batusangkar	6.664.229.000	6.664.229.000	6.863.119.401
5	PA Bukittinggi	14.759.642.859	14.759.642.859	14.828.442.859
6	PA Payakumbuh	10.635.390.900	10.635.390.900	10.735.390.309
7	PA Sawahlunto	8.489.374.000	8.489.374.000	8.870.902.250
8	PA Solok	5.862.398.000	5.862.398.000	6.123.713.304
9	PA Padang Panjang	2.835.182.000	2.835.182.000	3.031.788.868
10	PA Muara Labuh	4.367.214.000	4.367.214.000	4.367.214.000
11	PA Sijunjung	4.662.878.000	4.662.878.000	4.662.878.000
12	PA Koto Baru	13.193.620.250	13.193.620.250	13.388.060.250
13	PA Painan	2.197.400.000	2.197.400.000	3.013.464.948
14	PA Lubuk Sikaping	7.461.540.142	7.461.540.142	7.461.540.142
15	PA Talu	2.138.646.000	2.138.646.000	2.188.465.000
16	PA Maninjau	4.522.242.000	4.522.242.000	4.292.914.000
17	PA Tanjung Pati	9.328.782.300	9.328.782.300	11.256.017.200
18	PA Lubuk Basung	4.972.486.010	4.972.486.010	4.532.679.410
19	PA Pulau Punjung	0	0	27.261.257.366
TOTAL		139.948.226.536	139.948.226.536	170.932.932.832



JALAN, IRIGASI & JARINGAN

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan, irigasi dan jaringan ini mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan LAN. Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA. 2021, 2022 dan 2023 dapat dirinci sebagaimana berikut:

Rekap Nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 Wilayah PTA Padang				
No	Satker	Nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PTA Padang	151.017.000	151.017.000	0
2	PA Padang	0	0	0
3	PA Pariaman	0	0	0
4	PA Batusangkar	26.526.000	26.526.000	0
5	PA Bukittinggi	0	0	0
6	PA Payakumbuh	0	0	0
7	PA Sawahlunto	29.900.000	29.900.000	0
8	PA Solok	20.460.000	20.460.000	0
9	PA Padang Panjang	0	0	0
10	PA Muara Labuh	0	0	0
11	PA Sijunjung	0	0	0
12	PA Koto Baru	0	0	0
13	PA Painan	27.834.470	27.834.470	0
14	PA Lubuk Sikaping	0	0	0
15	PA Talu	49.819.000	49.819.000	0
16	PA Maninjau	32.320.000	32.320.000	19.320.000
17	PA Tanjung Pati	0	0	0
18	PA Lubuk Basung	0	0	0
19	PA Pulau Punjung	0	0	0
TOTAL		337.876.470	337.876.470	19.320.000



ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2021, 2022 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Rekap Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 Wilayah PTA Padang				
No	Satker	Nilai Aset Tetap Lainnya (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PTA Padang	86.247.765	86.604.974	86.604.974
2	PA Padang	59.751.626	59.751.626	60.108.835
3	PA Pariaman	3.676.728	4.033.937	9.191.849
4	PA Batusangkar	13.461.360	13.690.569	4.033.937
5	PA Bukittinggi	8.834.640	9.191.849	13.818.569
6	PA Payakumbuh	36.328.040	36.328.040	16.185.177
7	PA Sawahlunto	26.132.240	26.489.449	12.743.847
8	PA Solok	16.677.338	16.867.338	24.910.499
9	PA Padang Panjang	85.070.728	85.427.937	47.003.849
10	PA Muara Labuh	154.079.940	154.437.149	154.437.149
11	PA Sijunjung	46.646.640	46.646.640	22.623.849
12	PA Koto Baru	64.052.090	64.409.299	36.685.249
13	PA Painan	15.827.968	16.017.968	64.409.299
14	PA Lubuk Sikaping	12.386.638	12.386.638	17.034.547
15	PA Talu	22.266.640	22.623.849	66.999.618
16	PA Maninjau	24.553.290	24.910.499	85.427.937
17	PA Tanjung Pati	66.642.409	0	927.109
18	PA Lubuk Basung	5.829.037	6.186.246	26.489.449
19	PA Pulau Punjung	-	-	357.209
TOTAL		748.465.117	686.004.007	749.992.951



ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh PTA. Padang dan Pengadilan yang berada di bawahnya terdiri atas: software, aplikasi dan website. Nilai aset tak berwujud TA 2021, 2022 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Rekap Nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2023 Wilayah PTA Padang				
No	Satker	Nilai Aset Tak Berwujud (Rp)		
		2021	2022	2023
1	PTA Padang	15.838.220	15.838.220	15.838.220
2	PA Padang	4.948.220	4.948.220	0
3	PA Pariaman	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	PA Batusangkar	0	0	0
5	PA Bukittinggi	0	0	0
6	PA Payakumbuh	0	0	0
7	PA Sawahlunto	0	0	0
8	PA Solok	0	0	0
9	PA Padang Panjang	26.800.000	26.800.000	0
10	PA Muara Labuh	0	0	0
11	PA Sijunjung	0	0	0
12	PA Koto Baru	0	0	0
13	PA Painan	6.050.000	6.050.000	6.050.000
14	PA Lubuk Sikaping	0	0	0
15	PA Talu	0	0	0
16	PA Maninjau	0	0	0
17	PA Tanjung Pati	0	0	0
18	PA Lubuk Basung	0	0	0
19	PA Pulau Punjung	0	0	0
TOTAL		58.636.440	58.636.440	26.888.220



I PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN DI TAHUN 2023

1. PENAMBAHAN ALOKASI BELANJA PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

Untuk tahun 2023 beberapa Pengadilan Agama se-Sumatera Barat memperoleh alokasi belanja tambahan sebesar Rp238.000.000 yang terdiri dari renovasi ruang kerja hakim dan pemeliharaan gedung bangunan. Selain itu, Pengadilan Agama di Wilayah Sumatera Barat juga mendapatkan alokasi belanja tambahan. Berikut rincian Pengadilan Agama yang memperoleh anggaran belanja tambahan tahun 2023 :

Penambahan Alokasi Belanja di Wilayah PTA Padang Tahun 2023			
No	Satker	Jenis BMN	Nilai
1	PTA Padang	Renovasi Ruang Kerja Hakim	198.000.000
		Pemeliharaan Gedung Bangunan	40.000.000
2	PA Painan	Renovasi Atap dan PTSP	790.340.000
3	PA Padang	Peralatan Fasilitas Perkantoran	89.000.000
4	PA Pariaman	Lemari Arsip	50.000.000
5	PA Lubuk Basung	Gedung (PTSP)	180.000.000
6	PA Batusangkar	Renovasi Ruang PTSP, Ruang Mediasi dan Ruang Posbakum	140.259.000
7	PA Padang Panjang	Perluasan/ Renovasi Ruang Tunggu Sidang dan PTSP	196.606.868
8	PA Payakumbuh	AC	25.000.000
9	PA Payakumbuh	Renovasi Ruang PTSP	100.000.000
10	PA Sijunjung	Genset	200.000.000
11	PA Muara Labuh	Meubelair	179.000.000
12	PA Solok	AC 2PK, Mobiler	67.000.000

2. RINCIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Wilayah PTA Padang		
No	Satker	Nilai Perolehan
1	PA Pariaman	385.431.000
2	PA Batusangkar	9.500.000
3	PA Bukittinggi	44.000.000
4	PA Solok	67.000.000
5	PA Muara Labuh	17.900.000
6	PA Sijunjung	200.000.000
7	PA Talu	10.000.000
8	PA Tanjung Pati	10.000.000
9	PA Lubuk Basung	180.000.000
TOTAL		923.831.000

Terdapat 9 satker yang menerima belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2023. Pengadilan Agama Pariaman memperoleh alokasi belanja modal peralatan dan mesin tertinggi yakni sebesar Rp385.431.000 yang digunakan untuk pengadaan kendaraan roda 4 dan pengadaan lemari arsip. Selanjutnya, Pengadilan Agama Batusangkar mendapatkan alokasi belanja modal peralatan dan mesin terendah yakni sebesar Rp9.500.000 yang digunakan untuk Pengadaan Printer Anugerah MA 2022, kursi roda, dan *hearing aid*.

3. RINCIAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Padang mendapatkan belanja modal gedung dan bangunan berupa renovasi ruang kerja hakim dengan anggaran sebesar Rp198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Sebanyak 10 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat memperoleh alokasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp5.552.711.000 (lima milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah). Berikut rincian Pengadilan Agama yang memperoleh alokasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Wilayah PTA Padang		
No	Satker	Nilai Perolehan
1	PTA Padang	198.000.000
2	PA Padang	89.000.000
3	PA Pariaman	385.431.000
4	PA Batusangkar	172.459.000
5	PA Bukittinggi	70.000.000
6	PA Payakumbuh	100.000.000
7	PA Solok	67.000.000
8	PA Padang Panjang	199.750.000
9	PA Painan	790.340.000
10	PA Pulau Punjung	3.480.731.000
TOTAL		5.552.711.000



Ruang Kerja Hakim Tinggi
PTA Padang

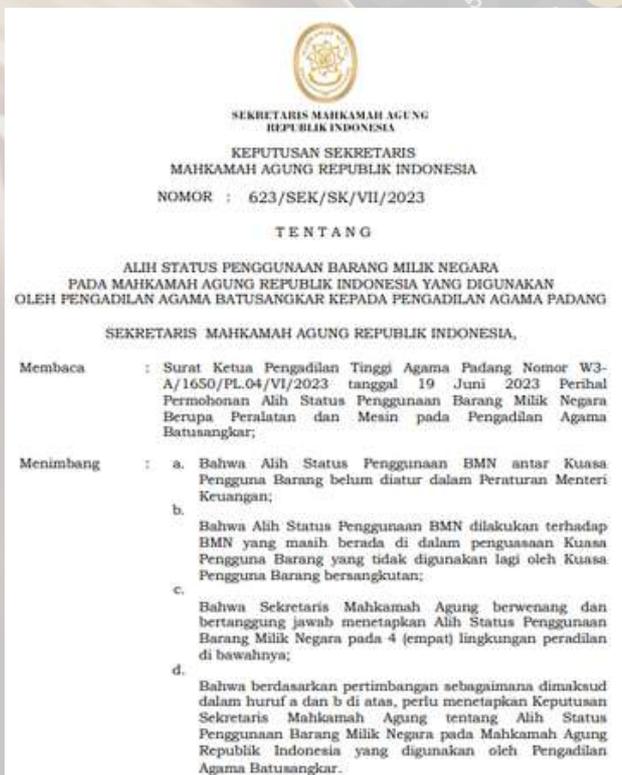


Dari 10 satker yang menerima belanja modal gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Pulau Punjung memperoleh alokasi belanja gedung dan bangunan tertinggi yakni sebesar Rp3.480.731.000 yang digunakan sebagai lanjutan sarana prasarana gedung dan sarling kantor sedangkan Pengadilan Agama Solok mendapatkan alokasi belanja gedung dan bangunan terendah yakni sebesar Rp67.000.000.

4. ALIH FUNGSI DAN PINJAM PAKAI BMN PTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan Pengamanan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Hal itu sesuai dengan PMK Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi Pengguna Barang memiliki kewenangan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya. Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Tahun 2023, dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak terdapat alih fungsi maupun Pinjam Pakai BMN. Namun terdapat 2 (dua) satuan kerja yang melakukan alih status Penggunaan BMN yakni Pengadilan Agama Batusangkar dengan Pengadilan Agama Padang.

Alih Status Penggunaan BMN 2023				
PTA Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat				
Satker Asal	Sakter Tujuan	Jenis BMN	Nilai (Rp)	Keterangan
Pengadilan Agama Batusangkar	Pengadilan Agama Padang	Rak Server	Rp. 9.572.800	Alih Status Penggunaan BMN dari Pengadilan Agama Batusangkar menjadi milik Pengadilan Agama Padang



Dokumentasi Alih Status Penggunaan BMN berupa Rak Server

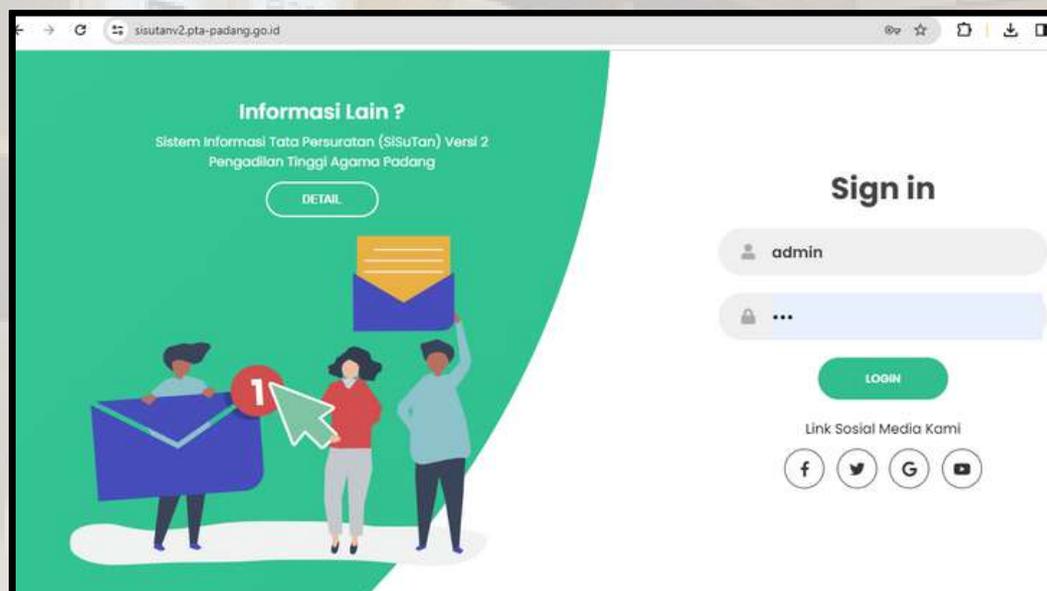


SARANA DAN PRASARANA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

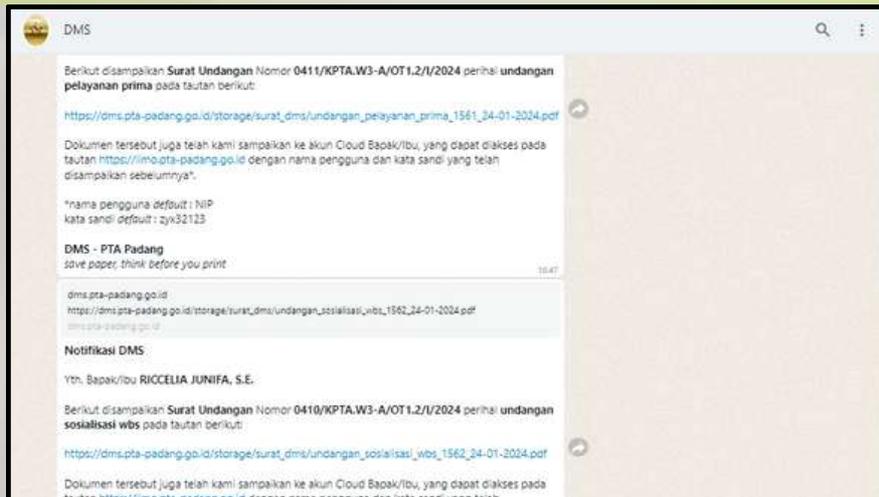
Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga merupakan pengembangan dan perubahan organisasi serta nomenklatur jabatan pada Pengadilan Tingkat Banding. Pengembangan dan perubahan dimaksud berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 306, dimana dinyatakan bahwa Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

PENGLOLAAN SURAT MENYURAT

I PENGLOLAAN SURAT MASUK



Penerimaan surat masuk pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi SiSutan (Sistem Informasi Tata Persuratan). Sejak Februari 2022, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pengembangan aplikasi menjadi Aplikasi SiSutan Versi II. Pengembangan Aplikasi SiSutan Versi II dilakukan dengan memunculkan fitur notifikasi otomatis melalui *whatsapp* ke dalam handphone pejabat yang dituju untuk pengisian lembar disposisi secara *online*.



fitur notifikasi otomatis DMS melalui *whatsapp*

Sejak Februari 2022, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pengembangan aplikasi menjadi Aplikasi SiSutan (Sistem Informasi Tata Persuratan) Versi II. Pengembangan Aplikasi SiSutan Versi II dilakukan dengan memunculkan fitur notifikasi otomatis melalui *whatsapp* ke dalam *handphone* pejabat yang dituju untuk pengisian lembar disposisi secara online. Penerimaan surat masuk pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi SiSutan Versi II selama tahun 2023 berjumlah 1976 surat.

No	Jenis	Jumlah
1	OT	333
2	KP	699
3	HM	291
4	HK	325
5	KS	2
6	KU	95
7	PL	117
8	PP	63
9	PB	10
10	PS	41

PENGELOLAAN SURAT KELUAR

No. ↑	Nomor	Tanggal	Tujuan	Isi	Konseptor	Draft Lamp	Penandatanganan	Scan	Validasi	QR Code
1	0066.a/SEK.PTA.W3-A/PL1.2.3/I/2023	02 January	SEKRETARIS PTA PADANG	SK Pemegang Barang BMN	Yova Nelindy, A.Md.		H.Idris Latif, S.H., M.H. Sekretaris	↑	!	↓
2	3423.e/SEK.PTA.W3-A/KU1.1/PL1.1.6/XII/2023	22 December	Hakim Tinggi	sptjm sewa rumah dinas Nurhafizal	Yova Nelindy, A.Md.		Ismail, S.H.I., M.A. Sekretaris	↑	!	↓
3	3423.d/SEK.PTA.W3-A/KU1.1/PL1.1.6/XII/2023	22 December	Hakim Tinggi	sptjm sewa rumah dinas nasrul k	Yova Nelindy, A.Md.		Ismail, S.H.I., M.A. Sekretaris	↑	!	↓
4	3423.c/SEK.PTA.W3-A/KU1.1/PL1.1.6/XII/2023	22 December	Hakim Tinggi	sptjm sewa rumah dinas najamudin	Yova Nelindy, A.Md.		Ismail, S.H.I., M.A. Sekretaris	↑	!	↓
5	3423.b/SEK.PTA.W3-A/KU1.1/PL1.1.6/XII/2023	22 December	Hakim Tinggi	sptjm sewa rumah dinas bahrul amzah	Yova Nelindy, A.Md.		Ismail, S.H.I., M.A. Sekretaris	↑	!	↓
6	3423.a/SEK.PTA.W3-A/KU1.1/PL1.1.6/XII/2023	22 December	Hakim Tinggi	sptjm sewa rumah dinas abdul hadi	Yova Nelindy, A.Md.		Ismail, S.H.I., M.A. Sekretaris	↑	!	↓
7	3425.a/KPTA.W3-A/KP8.2/KP5.4/XII/2023	22 December	Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI	Usulan Reviu	Elvi Yunita, S.H.		Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. Ketua	↑	!	↓

Aplikasi Surat Keluar Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	Jenis	Jumlah
1	DL	23
2	HK	173
3	HM	195
4	KA	1
5	KP	1658
6	KS	2
7	KU	762
8	OT	236
9	PB	2
10	PL	245
11	PP	96
12	PS	165
13	PW	16
14	RA	46
15	RT	2
16	TI	7
Jumlah		3629

Pengelolaan surat keluar di Pengadilan Tinggi Agama Padang menggunakan aplikasi Surat Keluar <https://surat.pta-padang.go.id/index.php>. Dalam aplikasi Surat Keluar, semua pegawai dapat mengakses untuk mengambil nomor surat keluar. Keadaan surat keluar dalam tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Agama Padang berjumlah 3.629 surat.

PEMELIHARAAN



Pemeliharaan di Pengadilan Tinggi Agama Padang meliputi:

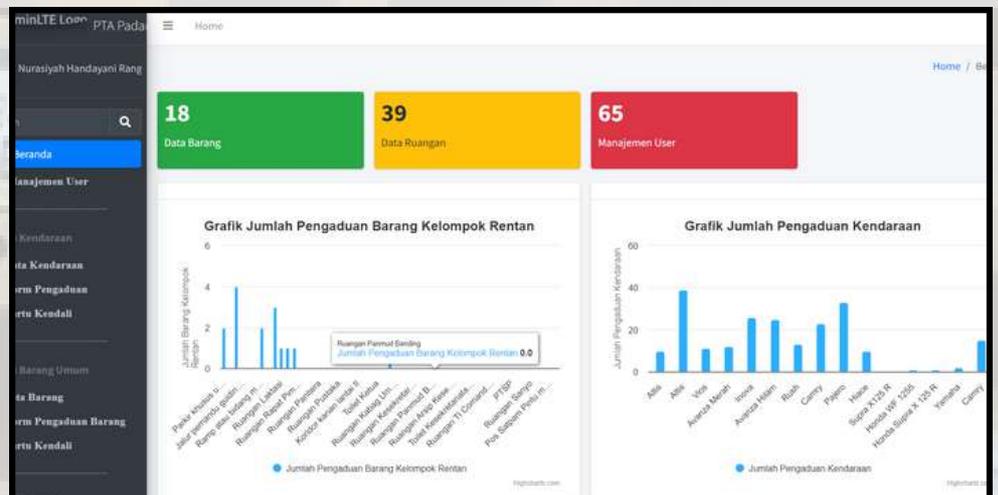
- Pemeliharaan/perawatan gedung dan sarana prasarana kantor dan sarana prasarana untuk kaum rentan;
- Pengadaan perlengkapan;
- Penjagaan keamanan dan kebersihan.

Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Padang meliputi:

- Pemeliharaan Ruang Ketua dan Wakil Ketua
- Perbaikan toilet wanita;
- Pemeliharaan Paving Blok
- Pemeliharaan/perbaikan Toilet Wanita



Selain itu juga dilakukan Pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana kelompok rentan atau disabilitas dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Rancak Bana (Rawat dan Ceklist Aset Kelompok Rentan Ibu dan Anak). Selain digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana kelompok kaum rentan dan disabilitas, Aplikasi Rancak Bana dirancang untuk monitoring pemeliharaan/perawatan gedung dan sarana prasarana kantor, pengadaan perlengkapan, dan monitoring terhadap kebersihan.



PENGELOLAAN TATA USAHA (PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN)

Pengelolaan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SLIM (perpustakaan Mahkamah Agung). Pendataan buku, peminjaman dan pengembalian buku dilakukan oleh petugas perpustakaan menggunakan aplikasi SLIM. Data per 31 Desember 2023, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengoleksi 4.076 eksamplar buku dengan rincian seperti pada gambar berikut:

DELETED	EDIT	TITLE	ISBN/ISSN	COPIES	LAST UPDATE
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Majalah Komisi Yudisial: Perkuat Kelembagaan Raih Kepercayaan Publik 19781458	19781458	2	2024-02-01 16:07:06
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eskalasi Modernitas Peradilan Agama: Di Ranah Minang 9789791310635	9789791310635	2	2024-02-01 15:58:17
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Majalah Peradilan Agama : Edisi XXII Agustus 2023 23552476	23552476	1	2024-01-10 11:56:38

Member ID	Member Name	Membership Type	Item Code	Title	Loan Date	Due Date	Loan Status
P121156	Dr. Drs. H.Pelmizar, M.H.I.	Pengadilan Tinggi Agama Padang	488	Shalat Khusus dengan Metode ST	2023-10-17	2023-10-24	Returned



1 PENATAAN ARSIP

Di tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif di bagian Kesekretariatan. Penyimpanan arsip inaktif ini dilakukan terhadap arsip-arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. Adapun arsip inaktif yang tersimpan di ruangan tersebut berasal dari masing-masing sub bagian di PTA Padang yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Sub Bagian Kepegawaian dan TI, dan Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran. Penataan dan penyimpanan arsip inaktif di PTA Padang mengacu kepada SK KMA nomor 11/KMA/SK/I/2025 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Kepegawaian, dan Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian Mahkamah Agung RI.



PEMUSNAHAN ARSIP PTA PADANG



Dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip yang baik, setelah memperoleh persetujuan Kepala Arsip Nasional RRI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip. Kegiatan dimulai secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat YM. Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. dengan didampingi oleh tim pelaksana. Kegiatan pemusnahan arsip PTA Sumatera Barat dilakukan pada Senin, 14 Agustus 2023 di Ruang Command Center H. Mansur Dt. Nagari Basa.

Pemusnahan Arsip yang terdiri arsip kepaniteraaran dan kesekretariatan menggunakan mesin penghacur kertas milik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan mesin tersebut tidak perlu dilakukan pembakaran, namun segala kerahasiaan di dalam satu dokumen terhapuskan bersamaan dengan serpihan kertas dari dokumen yang dihancurkan.



e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation

Login

Register Pengguna Terdaftar (Untuk Advokat)

Register Kurator

Syarat dan Ketentuan

PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

IMPLENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama membuat keputusan nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama melalui surat nomor 3091/DJA.3/HM.02.1/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penyampaian Keputusan Dirjen Badilag tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.

Mahkamah Agung RI mulai awal tahun 2020 membuat kebijakan untuk menerapkan persidangan secara elektronik/E-Litigasi bagi seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia, oleh karena itu mulai bulan Nopember 2019 Badan Peradilan Agama MARI mulai mencanangkan penerapan E-Litigasi di lingkungan peradilan agama. Pelaksanaan elitigasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 8 Tahun 2018 Nomor 3128/DJA/HM.02.3/XI/2018 tentang tata cara pengaktifan E-Court Mahkamah Agung RI untuk wilayah Pengadilan Agama. Pada awal tahun 2020 Mahkamah Agung membuat kebijakan untuk menerapkan persidangan secara elektronik/E-Litigasi bagi seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia. Sistem Peradilan elektronik (e-court) di Pengadilan meliputi:

- e-Filing (pendaftaran)
- e-Payment (pembayaran)
- e-Summons (pemanggilan)
- e-Litigation (persidangan)



Pada tahun 2023, seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan persidangan secara elektronik/eLitigation. Sebanyak 9.339 perkara didaftarkan melalui e-Court. Rekapitulasi perkara e-Court pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Implementasi e-Court Tahun 2023 di Lingkungan Peradilan Agama		
No	Satker	Jumlah Perkara e-Court
1	PA Padang	579
2	PA Pariaman	1201
3	PA Batusangkar	682
4	PA Bukittinggi	949
5	PA Payakumbuh	691
6	PA Sawahlunto	204
7	PA Solok	345
8	PA Padang Panjang	304
9	PA Muara Labuh	323
10	PA Sijunjung	214
11	PA Koto Baru	236
12	PA Painan	815
13	PA Lubuk Sikaping	431
14	PA Talu	973
15	PA Maninjau	185
16	PA Tanjung Pati	549
17	PA Lubuk Basung	275
18	PA Pulau Punjung	383
JUMLAH		9339

Pada 9 Agustus 2020 Ketua Mahkamah Agung, Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. meresmikan fitur upaya hukum banding pada aplikasi e-court. Upaya hukum banding tersebut diterapkan atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang sejak awal diproses dengan menggunakan acara secara elektronik. Pernyataan upaya hukum serta segala proses administrasi permohonan banding termasuk pengiriman berkas perkara banding dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding.



PRESTASI DAN PENGHARGAAN TERKAIT E-COURT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi	Keterangan (Peringkat)
		Kategori	Jenis		
1	PA Pariaman	Pengadilan terbaik dalam kinerja layanan e-Court Kategori Peradilan Agama dengan beban Kerja 1001-2500	Nasional	Mahkamah Agung RI	Peringkat I
		Satuan Kerja Dengan e-Court Terbaik Dengan Nilai 92,3% Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang	Provinsi	PTA Padang	Peringkat 1
2	PA Batusangkar	Peringkat I Kinerja e-Court Semester II Tahun 2023	Provinsi	PTA Padang	Peringkat I
		Peringkat 2 e-Court Pengguna Lain	Provinsi	PTA Padang	Peringkat II
3	PA Bukittinggi	e-Court Pengguna Lain	Provinsi	PTA Padang	Peringkat 3
4	PA Sawahlunto	Peringkat 4 sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara < 1000	Nasional	Mahkamah Agung RI	Peringkat 4
		Peringkat 2 Kategori Jenis Perkara Non Perceraian Kebendaan dengan Persentase Skor Rasio 99,68 dalam Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik Tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor Perkara 3/Pdt.G/2022/PA.SWL	Nasional	Mahkamah Agung RI	Peringkat 4



Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menerima 27 (dua puluh tujuh) perkara banding melalui e-court, perkara banding tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No.	NOMOR PERKARA		TANGGAL	
	TINGKAT PERTAMA	TINGKAT BANDING	REGISTER	PUTUS
1	348/Pdt.G/2022/PA.LB	7/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	12/01/2023	25/01/2023
2	958/Pdt.G/2022/PA.Prm	10/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	2/02/2023	14/02/2023
3	1129/Pdt.G/2022/PA.Prm	16/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	13/03/2023	31/03/2023
4	20/Pdt.G/2023/PA.ML	22/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	12/04/2023	10/05/2023
5	616/Pdt.G/2022/PA.Pn	34/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	13/06/2023	12/07/2023
6	48/Pdt.G/2023/PA.LK	35/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	20/06/2023	11/07/2023
7	240/Pdt.G/2023/PA.Pdg	38/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	6/07/2023	3/08/2023
8	415/Pdt.G/2023/PA.Pdg	39/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	21/07/2023	9/08/2023
9	52/Pdt.G/2023/PA.Lbs	42/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	27/07/2023	23/08/2023
10	188/Pdt.G/2023/PA.LK	45/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	14/08/2023	30/08/2023
11	273/Pdt.G/2023/PA.Bsk	46/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	21/08/2023	13/09/2023
12	210/Pdt.G/2023/PA.Pn	47/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	23/08/2023	13/09/2023
13	90/Pdt.G/2023/PA.SWL	48/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	8/09/2023	27/09/2023
14	85/Pdt.G/2023/PA.Pdg	50/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	13/09/2023	5/10/2023
15	122/Pdt.G/2023/PA.LB	52/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	18/09/2023	17/10/2023
16	188/Pdt.G/2023/PA.Lbs	53/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	21/09/2023	4/10/2023
17	635/Pdt.G/2023/PA.Pdg	56/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	3/10/2023	30/10/2023
18	692/Pdt.G/2023/PA.Pdg	57/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	3/10/2023	25/10/2023
19	805/Pdt.G/2023/PA.Pdg	60/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	24/10/2023	6/11/2023
20	577/Pdt.G/2023/PA.Pdg	61/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	27/10/2023	23/11/2023
21	272/Pdt.G/2023/PA.LK	64/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	6/11/2023	30/11/2023
22	273/Pdt.G/2023/PA.LK	63/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	6/11/2023	20/12/2023
23	356/Pdt.G/2023/PA.Pn	67/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	7/11/2023	30/11/2023
24	618/Pdt.G/2023/PA.Prm	70/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	20/11/2023	14/12/2023
25	477/Pdt.G/2023/PA.Pn	72/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	5/12/2023	22/12/2023
26	268/Pdt.G/2023/PA.LB	73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	7/12/2023	20/12/2023
27	250/Pdt.G/2023/PA.TALU	75/Pdt.G/2023/PTA.Pdg	14/12/2023	22/12/2023



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Mahkamah Agung Republik Indonesia

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Pada awalnya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bernama lain CTS (Case Tracking System) yang dibuat untuk lebih memudahkan publik mengakses riwayat perkara. Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung RI tentang transparansi lembaga peradilan dan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja peradilan maka dibuatlah aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk Mahkamah Agung RI. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat.

Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah karena selain data-data yang terkait dengan perkara, juga dapat dilihat data jumlah hakim dan penyebarannya, data panitera, kepatuhan pengisian perkara baru, kepatuhan pengisian jadwal sidang, statistik jumlah perkara masuk dan putus, statistik perkara yang terlambat penyelesaiannya, keberhasilan proses mediasi, demikian juga performance atau kinerja setiap pengadilan akan dapat dilihat. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien. Monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Layanan Informasi Berbasis Teknologi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis.

Apabila selama ini, pendokumentasikan administrasi perkara secara manual, maka akses untuk pengawasan juga hanya bisa dilakukan secara manual. Dengan adanya SIPP, maka sebagai sebuah aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi, membawa konsekuensi akan dapat dihubungkan kepada aplikasi lainnya dan dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan Pengadilan, sebagai konsekuensi sistem peradilan bertingkat, maka SIPP pada Pengadilan Agama, akan terhubung dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI. Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara realtime. Manakala suatu data perkara sudah diinput didalam SIPP Tingkat Banding maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di website.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet. Untuk pelaksanaan aplikasi SIPP, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengimplementasikannya. Dengan dukungan perangkat yang ada di seluruh Pengadilan Agama maka pemanfaatan SIPP dalam mendukung pelaksanaan proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar.

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) TINGKAT PERTAMA

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara dipengadilan yaitu SIPP.

SIPP Tingkat Pertama menerapkan konsep BINDALMIN dan SOP yang sangat akurat, yakni dengan menggunakan system penyelesaian perkara secara bertahap pada tiap prosesnya, jika ada proses yang dilewati, maka proses selanjutnya tidak akan bisa dilaksanakan. Hal ini sangat membantu dalam proses validitas data. Siapa yang bertanggung jawab untuk suatu tahapan, maka orang tersebut yang harus mengerjakannya pada SIPP Tingkat Pertama, dan hasil pekerjaannya akan dapat terlihat melalui riwayat perkara dan sistem audit trail yang memungkinkan untuk melihat sejarah penggunaan SIPP secara menyeluruh di suatu Pengadilan Agama.



Seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengimplementasikan SIPP untuk proses penyelesaian perkara. Dengan dukungan perangkat yang ada di seluruh Pengadilan Agama maka pemanfaatan SIPP dalam mendukung pelaksanaan proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar.

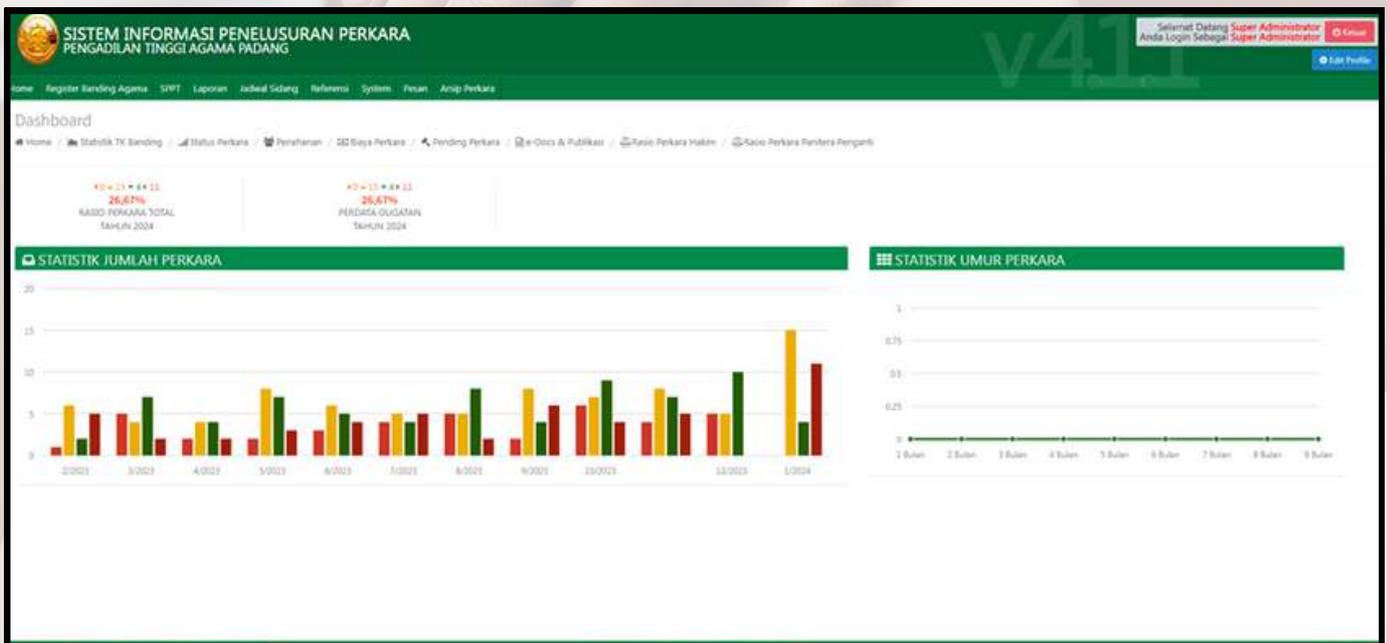
Dengan adanya aplikasi SIPP, dirasakan dampak positif yaitu:

- Mempermudah proses administrasi perkara mulai dari penerimaan hingga penyelesaian perkara dan pengarsipannya
- Memudahkan pencarian data perkara karena menggunakan proses input data yang terkomputerisasi khususnya dalam pembuatan laporan, akan sangat terbantu dalam membuat statistik dan rekapitulasi perkara.
- Khususnya dalam pembuatan laporan, akan sangat terbantu dalam membuat statistik dan rekapitulasi perkara

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) TINGKAT BANDING

Aplikasi SIPP Tingkat Banding telah dikembangkan semenjak tahun 2016 dan terus dikembangkan fitur-fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasikan keadaan perkaranya. Sistem administrasi peradilan harus selalu berjalan dengan baik. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi harus terus dilakukan di bawah koridor kebijakan Mahkamah Agung. Sistem evaluasi harus dilaksanakan secara periodik untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan kinerja setiap satuan kerja. Hambatan dan permasalahan harus terus dicarikan solusinya agar gerak organisasi pengadilan bisa terus berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil-hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online. Eksistensi aplikasi SIPP ini selanjutnya menegaskan komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dimana salah satu indikatornya adalah modern berbasis teknologi informasi terpadu.

Pelaksanaan administrasi perkara di tingkat banding, PTA Padang telah mengimplementasikan SIPP Tingkat Banding yang beroperasi secara online dan dapat diakses melalui koneksi internet. SIPP Tingkat Banding mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 2016, mulai dari proses penerimaan perkara banding, secara bertahap pada pembuatan PMH, P4, PHS serta pembuatan catatan sidang dan putusan. SIPP Tingkat Banding terkoneksi dengan SIPP Tingkat Pertama melalui proses sinkronisasi ke server SIPP Mahkamah Agung, sehingga mempermudah PTA Padang dalam mengelola data perkara banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama.



SIPP Tingkat Banding, layaknya SIPP Tingkat Pertama mampu menyediakan rekam jejak aktifitas pengguna (statistik pengguna), hal ini akan sangat bermanfaat dalam memantau aktifitas pengguna dalam menerapkan SIPP Tingkat Banding. Juga dapat dilihat alur dokumen yang berisi informasi tahapan penanganan perkara banding sejak penerimaan hingga arsip dan minutasasi berkas, dokumen apa saja yang dibuat dan siapa pembuatnya serta kapan pembuatannya. Singkatnya, apa yang dibuat di SIPP Tingkat Banding akan terekam dalam sejarah penggunaan, bagi siapa yang tidak menggunakannya maka tidak akan tercatat dalam sejarah penggunaan SIPP Tingkat Banding. SIPP Tingkat Banding juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang sangat bagus, baik dari nomor perkara, identitas pihak, maupun jenis perkaranya.

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) MAHKAMAH AGUNG RI

SIPP Mahkamah Agung merupakan sentral informasi terpusat yang menyediakan informasi tentang penyelesaian perkara seluruh Pengadilan, setelah melalui proses sinkronisasi dari server SIPP Tingkat Pertama dan divalidasi oleh Mahkamah Agung. Melalui SIPP Mahkamah Agung, PTA Padang dapat memonitoring kinerja Pengadilan Agama, meliputi kepatuhan sinkronisasi, persentase penyelesaian minutasasi perkara, statistik perkara, hingga kinerja individu tenaga teknis mulai dari hakim hingga panitera pengganti.





DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERANDA | PENCARIAN | DIREKTORI | PENGADILAN | PERATURAN | TENTANG

Pencarian: Kata Kunci:

Panduan Putusan 443

Amar

- Lain-lain 223
- Kabul 24
- Membatalkan 26
- Memperbaiki 25
- Mengusulkan 24
- Tidak dapat diterima 1
- Toak 2

Tingkat Proses

- Banding 423

Tahun Putusan

Ditemukan 643 data

Urut Berdasarkan:

Pengadilan + PTAPADANG + Perdata Agama + Peradilan
 Putusan PTA PADANG Nomor 45/Pdt.G/2013/PTA.Pdg
 Tanggal 11 Desember 2013 – PEMBANDING TERBANDING
 41 – 13

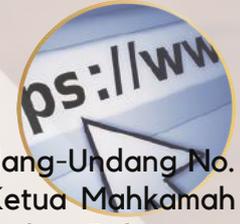
Pengadilan + PTAPADANG + Perdata Agama + Peradilan
 Register: 07-06-2013 – Putus: 14-06-2013 – Sisa: 18-12-2013
 Putusan PTA PADANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Pdg
 Tanggal 14 Agustus 2015 – PEMBANDING DAN TERBANDING
 54 – 16

Pengadilan + PTA PADANG + Perdata Agama + Peradilan
 Putusan: 12-08-2012 – Upload: 10-04-2013
 Putusan PTA PADANG Nomor 24/Pdt.G/2011/PTA.Pdg
 Tanggal 12 Agustus 2012 – dr. H. MUHAMMAD S. RASYIDIN KASIM CA
 34 – 13

Pengadilan + PTA PADANG + Perdata Agama + Peradilan
 Putusan: 13-07-2014 – Upload: 14-01-2015
 Putusan PTA PADANG Nomor 0018/Pdt.G/2014/PTA.Pdg
 Tanggal 15 Juli 2014 – PEMBANDING TERBANDING
 34 – 13

Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah media transparansi informasi perkara serta publikasi putusan yang merupakan produk Pengadilan. Setiap perkara yang telah putus, harus segera dipublikasikan di Direktori Putusan dengan mengisi informasi perkara dan mengupload dokumen putusan/penetapan yang sudah dikaburkan (anonimasi), sehingga kinerja penyelesaian suatu perkara dapat terbaca melalui Direktori Putusan, serta dokumen putusan dapat diakses secara bebas oleh publik.

WEBSITE RESMI DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Dalam mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. PTA Padang telah memiliki media informasi berupa website yang dapat diakses melalui <http://www.pta-padang.go.id>.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
 Jl. By Pass Km.24, Kel. Batipuh Panjang, Kec. Koto Tengah, Padang, 25171
 Telp. (0751)7054806, Fax. (0751)40537, e-mail: admin@pta-padang.go.id

HARI : Kamis, TANGGAL : 01 February 2024

DOWNLOAD SK Pedoman PTSP Badan Peradilan Agama 2018

HOME | PROFIL | INFORMASI & ADUAN | TRANSPARANSI | PUBLIKASI | INFO PERKARA | ZONA INTEGRITAS & RB | UNDUF

SELAMAT DATANG
ANDA MEMASUKI WILAYAH

STOP
 BARTIFIKASI
 LIHAT LAWAH LAPORKAN

BerAKHLAK
 bangga melayani bangsa

W3C120

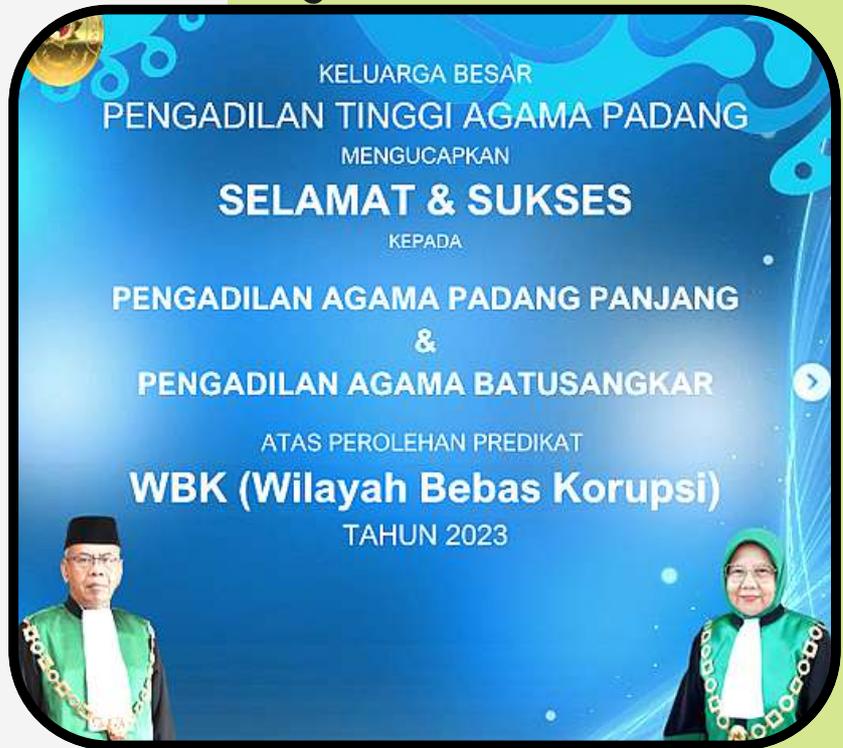
Melalui website tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyajikan seluruh informasi terkait profil lembaga, kewenangan dan kebijakan, kegiatan dan informasi terkini, transparansi perkara, transparansi keuangan, pengawasan, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi publik. Dan hingga saat ini, 18 Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Padang telah memiliki website sebagai berikut:

1. PA Padang <https://www.pa-padang.go.id/>
2. PA Pariaman <http://www.pa-pariaman.go.id/>
3. PA Batusangkar <https://pa-batusangkar.go.id/>
4. PA Bukittinggi <http://www.pa-bukittinggi.go.id/>
5. PA Payakumbuh <https://www.pa-payakumbuh.go.id/>
6. PA Sawahlunto <http://www.pa-sawahlunto.go.id/>
7. PA Solok <https://www.pa-solok.go.id/>
8. PA Padang Panjang <http://www.pa-padangpanjang.go.id/>
9. PA Muara Labuh <https://www.pa-muaralabuh.go.id/>
10. PA Sijunjung <http://pa-sijunjung.go.id/>
11. PA Koto Baru <https://www.pa-kotobaru.go.id/>
12. PA Painan <http://www.pa-painan.go.id/>
13. PA Lubuk Sikaping <https://www.pa-lubuksikaping.go.id/>
14. PA Talu <https://www.pa-talu.go.id>
15. PA Maninjau <https://www.pa-maninjau.go.id/>
16. PA Tanjung Pati <http://pa-tanjungpati.go.id/>
17. PA Lubuk Basung <http://www.pa-lubukbasung.go.id/>
18. PA Pulau Punjung <http://pa-pulaupunjung.go.id/>



BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik





PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Mahkamah Agung RI, khususnya di Lingkungan Badan Peradilan Agama, pelaksanaan Zona Integritas merupakan suatu keharusan yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang ditetapkan dalam PERMENPAN Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Tuntutan reformasi birokrasi di segala lini mengharuskan setiap instansi pemerintah berkomitmen menjaga nilai-nilai integritas dan mendorong pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Amanat dibentuknya Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM telah didukung oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Peradilan Agama. Berkenaan dengan program tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu lembaga Peradilan di Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan integritas para pegawainya dan juga berusaha memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya di propinsi Sumatera Barat.

Pengadilan Tinggi Agama Padang meraih Penganugerahan Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut melalui zoom meeting yang di ikuti oleh Ketua PTA Padang periode 2019-2022 Drs. H. Zein Ahsan M.H, beserta Wakil Ketua PTA Padang Dr. Abdul Hakim, jajaran hakim tinggi serta seluruh pegawai PTA Padang di Ruang Command Centre PTA Padang. Pengadilan Tinggi Agama Padang terus berupaya untuk melanjutkan perjuangan dalam meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Pada tahun 2023 ini, Kemenpan RB memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan penilaian dan penetapan satuan kerja secara mandiri tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sebelumnya, penilaian dan penetapan satuan kerja yang meraih WBK dilakukan oleh Kemenpan RB, Mahkamah Agung hanya melakukan penilaian tentang LKE yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan sebagai Tim Penilai Internal (TPI).

Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Mahkamah Agung mengumumkan satuan kerja yang meraih WBK melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 tentang Daftar Satuan Kerja Memenuhi Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2023. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Mahkamah Agung RI, ada 33 satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK dengan rincian 6 (enam) satuan kerja di lingkungan peradilan umum, 24 satuan kerja dari lingkungan peradilan agama, 1 (satu) satuan kerja dari lingkungan peradilan militer dan 2 (dua) satuan kerja dari lingkungan peradilan tata usaha negara.

Predikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 (enam) area pembangunan zona integritas serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima dan berkualitas. Predikat WBK ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan melayani publik dengan prima. Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi.

Terdapat 2 (dua) satuan kerja di lingkungan PTA Padang yang meraih WBK tahun 2023 ini yaitu PA Batusangkar dan PA Padang Panjang. Kedua satuan kerja ini telah berusaha dan berjuang untuk meraih WBK sejak tahun 2019, tapi rupanya tahun 2023 inilah tahun keberuntungan yaitu dengan diraihnya WBK tersebut. Sebelumnya, ada 3 (tiga) satuan kerja yang telah memperoleh WBK yaitu PA Sawahlunto, PA Solok dan PTA Padang. Ketua PTA Padang, H. Abd Hamid Pulungan menjelaskan bahwa PTA Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung akan mensupport Pengadilan Agama supaya berlomba-lomba dan berjuang meraih WBK tahun 2024. Menurutnya, prestasi yang hebat ini adalah atas keberhasilan bersama seluruh aparatur yang telah bekerja keras dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.



**KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI
PADA 60 (ENAM PULUH) SATUAN KERJA**

- 1. PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**
- 2. PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

No	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Predikat
29	Pengadilan Agama Padang Panjang	Pengungkit 48,26 Hasil 38,66 IPAK 4,00 IPKP 3,98 Nilai Total 86,92	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah cukup memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi sudah dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat/pihak berperka melalui program kegiatan baik di dalam kantor maupun di luar kantor dengan melakukan sidang keliling dan PTSP keliling serta pengantaran produk layanan ke masyarakat. Selain itu sudah dibangun kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu Wali Nagari, Dukcapil Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan (untuk dispensasi nikah), PT Pos; c) Unit kerja yang diusulkan sudah mengupayakan pencegahan terhadap praktek pungli, gratifikasi melalui informasi dan himbauan yang ditampilkan pada banner, website, dan media sosial. Selain itu pada surat tercatat dan relaas yang disampaikan oleh jurusita kepada pihak sudah menginformasikan himbauan pencegahan; d. Unit kerja yang diusulkan sudah cukup memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.	a. Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan ZI secara menyeluruh, tidak hanya di Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b. Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; c. Meningkatkan program pencegahan korupsi melalui berbagai sarana dan kerjasama yang sinergi dengan instansi lain (stakeholder). d. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK
18	Pengadilan Agama Batu Sangkar	Pengungkit 50,61 Hasil 38,53 IPAK 3,98 IPKP 3,97 Nilai Total 89,14	Memenuhi Kriteria WBK	a) Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja sudah cukup memiliki pengetahuan yang baik tentang ZI, unit kerja mampu menjelaskan kondisi apa saja yang ingin diwujudkan pada tiap area perubahan dan operasionalisasinya pada pekerjaan sehari-hari; b) Inovasi sudah dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat/pihak berperka melalui program kegiatan baik di dalam kantor maupun di luar kantor dengan melakukan sidang keliling dan PTSP keliling serta pengantaran produk layanan ke masyarakat. Selain itu sudah dibangun kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu Wali Nagari, Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan (untuk dispensasi nikah), Kementerian Agama (KUA), PT Pos, Dinas Sosial (perlindungan anak dan perempuan), perguruan tinggi (UIN); c) Unit kerja yang diusulkan sudah mengupayakan pencegahan terhadap praktek pungli, gratifikasi melalui informasi dan himbauan yang ditampilkan pada banner, website, dan media sosial. Selain itu pada surat tercatat dan relaas yang disampaikan oleh jurusita kepada pihak sudah menginformasikan himbauan pencegahan; d. Unit kerja yang diusulkan sudah cukup memahami definisi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja (program coffe morning yang diadakan setiap jumat).	a. Mengoptimalkan internalisasi terkait dengan pemahaman atas pembangunan ZI secara menyeluruh, tidak hanya di Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan ZI; b. Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; c. Meningkatkan program pencegahan korupsi melalui berbagai sarana dan kerjasama yang sinergi dengan instansi lain (stakeholder). d. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti secara berkala dengan membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja.	WBK

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Terpadu satu Pintu (One Gate Integrated Service) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik khususnya para pencari keadilan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tersebut agar mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, terjangkau dan terintegrasi, maka seluruh Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tahun 2023 terdapat 5 satker di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mendapatkan anggaran Belanja Modal Renovasi Ruang PTSP. Satker tersebut adalah PA Batusangkar, PA Padang Panjang, PA Painan, PA Payakumbuh dan PA Lubuk Basung. Satker Lubuk Basung yang mendapatkan anggaran PTSP dari Anggran Tambahan Tahun 2023 masih belum tuntas dalam melakukan renovasi ruang PTSP dan memerlukan anggaran biaya renovasi lanjutan.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

1. PA PARIAMAN



2. PA SOLOK



3. PA SAWAHLUNTO



4. PA TANJUNG PATI



5. PA BATUSANGKAR



6. PA PADANG



7. PA PADANG PANJANG



8. PA SIJUNJUNG



9. PA KOTOBARU



10. PA MUARA LABUH



11. PA PAINAN



12. PA BUKITTINGGI



13. PA LUBUK SIKAPING



14. PA TALU



15. PA MANINJAU



16. PA PAYAKUMBUH



17. PA TANJUNG PATI



18. PA LUBUK BASUNG

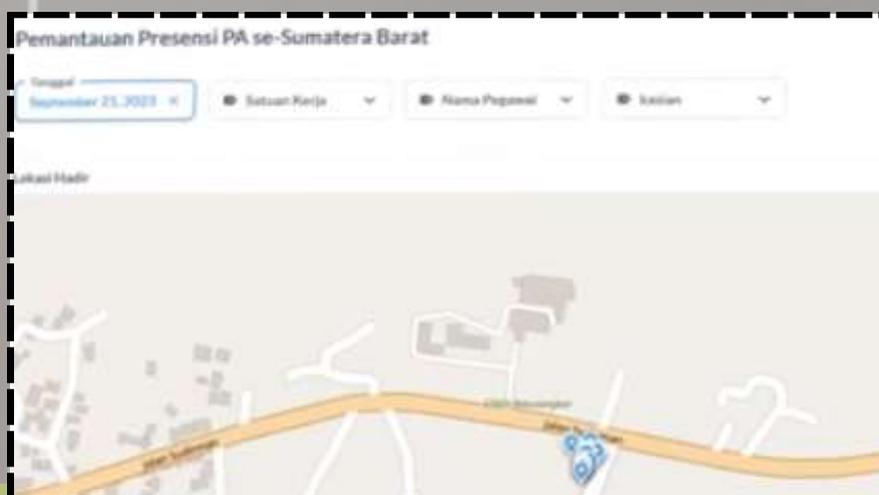


INOVASI PELAYANAN PUBLIK

FITUR PEMANTAUAN APLIKASI SI UPIK

Dalam rangka pemantapan implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengembangkan fitur pemantauan presensi pada aplikasi Sistem Informasi Urusan Kepegawaian (SIUPIK) yang telah diluncurkan pada tanggal 25 September 2023 di Pulau Punjung.

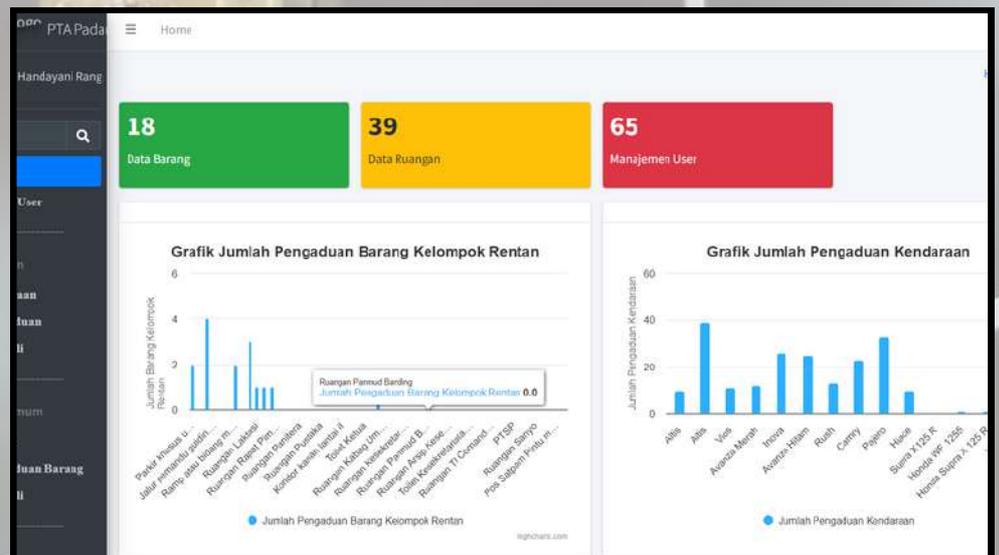
Launching Aplikasi SIUPIK dengan Fitur Pemantauan Presensi untuk pegawai di Lingkungan PTA Padang ini dipimpin oleh Ketua PTA Padang dengan didampingi oleh Wakil, Panitera dan Sekretaris. Aplikasi ini berfungsi sebagai monitor dan pengawasan bagi kedisiplinan absensi pegawai di lingkungan PTA Padang. Selain terintegrasi dengan aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, SIUPIK juga dilengkapi dengan fitur notifikasi setiap perkembangan tahapan usulan kepegawaian untuk semua Hakim dan Aparatur yang sedang diusulkan. Penggunaan Aplikasi ini dapat diakses pada tautan <https://siupik.pta-padang.go.id/login>. Sebagai pedoman penggunaan, pengelola presensi dapat mengakses petunjuk penggunaan yang dapat diakses pada tautan <https://ptapadang.gitbook.io/aplikasi-siupik>.



INOVASI PELAYANAN PUBLIK

APLIKASI RANCAK BANA PTA PADANG

Aplikasi Rancak Bana (Rawat dan Ceklist Aset Kelompok Rentan Ibu dan Anak) merupakan aplikasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pada kelompok rentan dan disabilitas. Sejalan dengan Pidato Presiden Jokowi Widodo dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2021 secara virtual pada Selasa, 22 Februari 2022. Beliau berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan.



No	Jenis Kegiatan	Minggu 1									
		SN		SL		RB		KM		JM	
		CP	H	CP	H	CP	H	CP	H	CP	H
1	Menyapu dan mengpel lantai seluruh sudut ruangan, dengan larutan pel	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B
2	Mengosongkan dan membersihkan tempat sampah	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B
3	Membersihkan langit-langit dan ventilasi udara dalam ruangan*	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B
4	Mengelap kaca jendela ruang kerja bagian dalam, luar dan sisi pinggir jendela	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B	✓	B

Selain digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana kelompok kaum rentan dan disabilitas, Aplikasi Rancak Bana dirancang untuk monitoring pemeliharaan/perawatan gedung dan sarana prasarana kantor, pengadaan perlengkapan, dan monitoring terhadap kebersihan.

INFORMASI LAPORAN SAKIP DALAM BENTUK VIDEO AUDIO

Perkembangan teknologi saat ini dapat membantu perpanjangan tangan PTA Padang dalam memberikan informasi terkait pelaporan SAKIP. Salah satu cara yang cukup efektif dalam penyampaian laporan SAKIP ini adalah melalui video audio, karena masyarakat cenderung tertarik dengan sesuatu hal yang divisualisasikan sehingga penerimaan informasi lebih cepat dan efektif.

Kemudahan memperoleh akses informasi ini juga dapat dengan mudah melalui *scan barcode* atau biasa dikenal dengan *Quick Response Code (QR code)* yang digunakan sebagai media penyimpanan video audio informasi laporan SAKIP PTA Padang.



Video audio informasi laporan SAKIP Tahun 2022 PTA Padang dapat diakses melalui *scan QR code* yang sudah di upload pada website resmi PTA Padang (www.pta-padang.go.id). Selain itu, QR code ini diletakkan pada lokasi-lokasi strategis di lingkungan PTA Padang.



VIDEO ALUR PELAYANAN DENGAN PENGGUNAAN BAHASA ISYARAT

Video alur pelayanan dengan penggunaan bahasa isyarat ini menjadi salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh PTA Padang kepada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas. Video pelayanan informasi ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Minang. Masyarakat dapat mengakses video ini pada kanal Youtube dan TV Media Pengadilan Tinggi Agama Padang.



BROSUR ALUR PELAYANAN INFORMASI PTSP PTA PADANG

Brosur yang berisi alur pelayanan informasi pada PTSP PTA Padang ini merupakan suatu terobosan dalam menunjang pemberian informasi kepada masyarakat. Brosur ini dapat diakses pada website resmi PTA Padang (www.pta-padang.go.id) dan sudah dilengkapi dengan audio 2 bahasa (Indonesia dan Minang) yang dapat memudahkan masyarakat dalam memahami alur pelayanan informasi tersebut. Brosur ini juga dapat diakses melalui scan QR Code.



PENGANTARAN AKTA CERAI MELALUI APLIKASI POS INDONESIA (PANTAI MOSIA)

merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar para pihak dapat memperoleh produk pengadilan berupa akta cerai yang diantarkan langsung ke tempat tinggal para pihak melalui kerjasama antara Pengadilan Agama Pariaman dengan PT POS Indonesia agar terhindar dari praktik korupsi dan gratifikasi.



LAYANAN SIMPATIK (SISTEM PELAYANAN PA TANJUNG PATI KELILING)

SIMPATIK hadir untuk memberikan akses hukum kepada masyarakat dengan menggunakan mobil keliling. Merupakan Layanan Unggulan dari satker PA Tanjung Pati. Adapun pelayanan yang didapatkan adalah berupa:

1. Pendaftaran perkara e-court;
2. Informasi dan konsultasi hukum;
3. Penyerahan produk pengadilan;
4. Pos bantuan Hukum



LAYANAN PTSP KELILING MELAYANI DENGAN HUMANIS (LANSEK MANIH)

Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan dengan cara datang langsung ke Nagari-nagari Kab. Sijunjung melalui inovasi LANSEK MANIH (Layanan PTSP Keliling Melayani Dengan Humanis). Ini merupakan layanan unggulan pada satker PA Sijunjung. Petugas dari PA Sijunjung akan memberikan layanan, berupa : 1. Layanan Informasi, Konsultasi dan pengaduan; 2. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara; 3. Penyerahan Akta Cerai 4. Penyerahan sisa panjar biaya perkara.



OUTLET PELAYANAN PENGADADILAN AGAMA PADANG DI MALL PELAYANAN PUBLIK

merupakan bagian dari langkah strategis yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang untuk memudahkan masyarakat Kota Padang dalam memperoleh layanan, baik memperoleh informasi maupun pengambilan produk pengadilan. Adapun Jam Pelayanan MPP PA Padang ini sejak hari Senin s.d. Jum'at Pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB dengan Layanan yang Tersedia berupa:

- Layanan Informasi (Informasi pembuatan surat gugatan/permohonan, Informasi pendaftaran Perkara, Informasi Proses Persidangan melalui E-Court, Permohonan Informasi Publik)
- Layanan E-Court (Pembuatan akun E-Court pengguna lain, Pendaftaran perkara melalui E-Court bagi pengguna lain)
- Layanan Produk Pengadilan (Akta Cerai dan Salinan Putusan dan Penetapan)



BAB VI

Pengawasan





Pengawasan merupakan salah satu aspek manajemen yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi karena pengawasan berfungsi untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan. Inti pengawasan adalah pengendalian dan pengendalian mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan.



PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan tingkat banding yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung berkewajiban mengawasi jalannya peradilan di lingkungan peradilan agama yang berada dalam wilayah hukumnya dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA.096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006, tanggung jawab pengawasan ada pada Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W3-A/1987/PS.00/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawasan Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023.

Dirjen Badilag dalam instruksinya menyatakan bahwa Hakim Tinggi Pengawas dalam melakukan pengawasan agar mengacu pada standar Akreditasi Penjaminan Mutu guna meningkatkan efektifitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan/atau pelanggaran perilaku bagi Hakim dan aparatur peradilan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan baik didalam maupun diluar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017.

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023			
No	Hakim Tinggi	Pendamping	Satker
1	Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.	Kutung Saraini, S.Ag.	PA Tanjung Pati
		Enjer Sades, S.H.	PA Sawahlunto
2	Drs. H. Nasrul K, S.H, M.H.	Neli Oktavia, S.H.	PA Sijunjung
		Syaiful Ashar, S.H.	PA Painan
3	Drs. Bahrul Amzah, M.H.	Hj. Alifah, S.H.	PA Padang
		Drs. Daryamurni	PA Batusangkar
			PA Bukittinggi
4	Drs. H. Abdul Jabar, M.H.	Dra. Syuryati	PA Payakumbuh
			PA Maninjau
5	Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.	H. Masdi, S.H.	PA Lubuk Sikaping
		H.M. Yazid. ZA, S.H, M.H.	PA Pariaman
			PA Talu
6	Drs. Najamuddin, S.H, M.H.	Nora Oktavia, S.H.	PA Kotobaru
		Drs. Syaiful Ashar, S.H.	PA Padang Panjang
			PA Muara Labuh

Temuan pengawasan yang telah di ekspos dan mendapat tanggapan dari objek pemeriksaan disusun oleh masing-masing Tim Pengawas dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan dikuatkan dengan penandatanganan kontrak kinerja masing-masing pemangku objek pemeriksaan. Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) yang disusun diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai koordinator Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk ditelaah. Hasil telaah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang disusun dalam bentuk kesimpulan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut.





PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan melekat merupakan bentuk pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya baik secara preventif maupun secara represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang diselenggarakan melalui rapat-rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala dan rutin. Setiap atasan langsung melakukan rapat setiap hari Senin untuk evaluasi kinerja minggu lalu dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas minggu berjalan selanjutnya dalam setiap akhir bulan dilakukan evaluasi oleh pejabat penanggung jawab bidang masing-masing. Panitera melakukan evaluasi bidang kepaniteraan bersama Panitera Muda dan Sekretaris melakukan evaluasi bersama Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan pada rapat koordinasi dan evaluasi tingkat pimpinan pada awal bulan.

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023

No	Hakim Tinggi	Pendamping	Satker
1	Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I.	Nora Oktavia	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
2	Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.	Dra. Syuryati	Keuangan dan Laporan Perkara
3	Drs. Najamuddin, S.H, M.H.	H.M. Yazid. ZA, S.H, M.H.	Administrasi dan Registrasi Perkara
4	Drs. H. Nasrul K, S.H, M.H.	Kutung Saraini, S.Ag.	Minutasi dan Kearsipan Perkara
5	Drs. Bahrul Amzah, M.H.	Mukhlis, S.H.	Perencanaan, Kepegawaian, dan Website
6	Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.	Ismail, S.H.I, M.A	Umum dan Keuangan

BAB VII

Penutup



KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun peningkatan kualitas dan pengembangan prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas PTA Padang kepada publik.

1. Bisnis proses Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Perkara banding yang diterima tahun 2023 sebanyak 75 perkara, berhasil diputus dan diselesaikan sejumlah 75 perkara, sehingga kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk tahun 2023 adalah 100%. Sementara itu, perkara pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat diterima 12.780 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 260 perkara. Perkara yang telah berhasil diputus sebanyak 12.780 perkara. Dari penyelesaian perkara tersebut, maka sisa perkara pada akhir tahun 2023 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sebanyak 235 perkara.
2. Sumber Daya Manusia pada wilayah Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sebesar 457 orang. Untuk jabatan teknis perlu adanya penambahan hakim, pejabat kepaniteraan, dan kejurusitaan, sebab ada beberapa pengadilan agama di Sumatera Barat yang masih kekurangan jabatan teknis tersebut yang berakibat lambatnya penyelesaian perkara. Sementara itu untuk jabatan non teknis perlu dilakukan penambahan SDM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
3. Realisasi Tahun Anggaran 2023, DIPA 01 sebesar 99.88% sedangkan DIPA 04 sebesar 99.92%.
4. Di bidang reformasi birokrasi, terdapat 2 (dua) satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2023 ini yaitu Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan Agama Padang Panjang. Hal ini menambah raihan prestasi satker yang telah meraih WBK di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang menjadi 5 satker. Sebelumnya, pada tahun 2021 PTA Padang berhasil mengukir prestasi dengan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 20 Desember 2021. Raihan ini sekaligus menyusul 2 satker di Wilayah PTA Padang yang memperoleh WBK pada tahun sebelumnya.





REKOMENDASI

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan, agar Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama di wilayahnya diberi penambahan pegawai sesuai dengan semakin beratnya beban tugas Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang serta perlunya peningkatan kualitas Hakim dan ASN dalam penggunaan teknologi informasi melalui bimtek/pelatihan teknis Untuk meningkatkan kompetensi hakim perlu diadakan bimbingan teknis yustisial.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan publik, diperlukan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.
3. Usulan pendirian 2 (dua) Pengadilan Agama baru di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu Pengadilan Agama Mentawai dan Pengadilan Agama Padang Pariaman.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan publik dan juga tuntutan Akreditasi serta WBBM diperlukan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya, dan juga pemenuhan penggunaan teknologi informasi dalam rangka modernisasi pengadilan berkelanjutan juga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana penunjangnya seperti pengadaan server dan pembaruan jaringan.
5. Dalam meningkatkan pelayanan yang prima perlu pengadilan agama yang *prototype*, maka diharapkan Mahkamah Agung memprioritaskan 5 (lima) Pengadilan Agama yang belum *prototype* yakni PA Painan, PA Muara Labuh, PA Padang Panjang, PA Sijunjung, dan PA Talu.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0177/KPTA.W3-A/OT1.6/I/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
b. bahwa Pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2023;
- KESATU : Menunjuk Pejabat / Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut namanya pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023;
- KEDUA : Tim bertugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2023 dengan berpedoman kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,



m ABD. HAMID PULUNGAN f

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0177/KPTA.W3-A/OT1.6/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Penanggung jawab : 1. Drs. Syafruddin
2. Ismail, S.H.I., M.A.

Ketua : Mukhlis, S.H.

Sekretaris : Elvi Yunita, S.H., M.H.

Anggota : 1. H. Damris, S.H.
2. H. Masdi, S.H.
3. Millia Sufia, S.E.,S.H.,M.M.
4. Rifka Hidayat, S.H.
5. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
6. Dra. Syuryati
7. H. M. Yazid, ZA., S.H., M.H.
8. Riswan, S.H.
9. Hj. Alifah, S.H.
10. Drs. Mawardi
11. Nora Oktavia, S.H.
12. H. Kutung Saraini, S. Ag
13. Enjer Sades, S.H.
14. Drs. Daryamurni
15. Nelly Oktavia, S.H.
16. Aidil Akbar, S.E.
17. Berki Rahmat, S.Kom.
18. Elsa Rusdiana, S.E.
19. Mursyidah, S.AP.
20. Arya Jaya Shentika, S.H.
21. Masfadhlul Karmi, S.A.P.
22. Jelsita Novi, S.H.
23. Riccelia Junifa S.E.
24. Yasirli Amri, S.Kom.
25. Ade Armawi Paypas, S.Kom

26. Efri Sukma
27. Fitrya Rafani, S.Kom
28. Novia Mayasari, S.E.
29. Yova Nelindy, A.Md
30. Rinaldi Orlando, A.Md.A.B.
31. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A,B.
32. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B
33. Nella Agustri, S.E.
34. Nurfadilla S.I.P.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN



**PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM. 24
Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171
(0751) 7054806
admin@pta-padang.go.id